

# INDONESIA 2022



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI



## PROGRAM PRIORITAS DAN *QUICK WINS*

KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

# 2022



# G20

## INDONESIA 2022







## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>		<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>v</b>
<b>1.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	A. Matriks Program Prioritas Tahun 2022	<b>6</b>
	B. Capaian Program Prioritas Tahun 2022	<b>30</b>
	<b>QUICK WINS</b>	<b>65</b>
<b>3.</b>	A. Matriks <i>Quick Wins</i> Tahun 2022	<b>66</b>
	B. Capaian <i>Quick Wins</i> Tahun 2022	<b>68</b>
<b>4.</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
	Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 158/S Tahun 2022 Tentang Penetapan Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020	<b>73</b>
	Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 159/S Tahun 2022 Tentang Penetapan <i>Quick Wins</i> Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020	<b>109</b>







## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan **Program Prioritas** dan **Quick Wins** Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2022 dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan Program Prioritas dan *Quick Wins* disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins* sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Program Prioritas merupakan program yang menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat isu, lintas sektor, berskala besar dan memiliki urgensi serta berdampak luas bagi masyarakat.

Program percepatan (*Quick Wins*) merupakan salah satu program reformasi birokrasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang merupakan sebuah kegiatan nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pihak internal dan eksternal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. *Quick Wins* merupakan suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam jangka waktu 1 tahun sehingga Implementasi *quick wins* dapat diwujudkan dengan cara memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau baik eksternal dan maupun internal kementerian/lembaga.

Akhir kata, semoga dengan adanya Program Prioritas dan *Quick Wins* akan membantu percepatan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kemenko Marves dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Tak lupa kami sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berdedikasi penuh untuk menyumbangkan tenaga dan pemikirannya demi terselesainya buku ini.

Besar harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Jakarta, Desember 2022

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



**Ayodhia G.L. Kalake**





Selamat Datang  
di Nursery PT V

Menko Marwan  
Jend. TNI (Purn)  
Luhut Binsar Pa

VALE

Luhut  
Menteri





# 1. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pemerintahan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang merupakan bentuk proses adaptasi untuk mempersiapkan organisasi agar mampu menghadapi kompleksitas dan dinamika yang begitu tinggi. Dalam pelaksanaan agenda tersebut, Program Prioritas dan *Quick Wins* atau Program Percepatan menjadi momentum bagi Kemenko Marves untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Program Prioritas dan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan langkah cepat Kemenko Marves dalam mendukung peningkatan Reformasi Birokrasi di Kemenko Marves. Selain itu juga, Program Prioritas dan *Quick Wins* dilakukan guna mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024.

Program Prioritas dan *Quick Wins* dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Program Prioritas dan *Quick Wins* ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins* dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, sehingga dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya, diperlukan evaluasi atas capaian keberhasilan dari pelaksanaan Program Prioritas dan *Quick Wins* di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.



KEMEN  
BIDAN  
DAN IN





## 2. PROGRAM PRIORITAS

**P**elaksanaan Program Prioritas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan suatu upaya dalam mendukung Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang signifikan dan strategis bagi pencapaian Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 maupun pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil seleksi dan penilaian Program Prioritas Tahun 2022, telah ditetapkan 21 kegiatan sebagai Program Prioritas tahun 2022 dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 158/S Tahun 2022 tentang Penetapan Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022. Adapun Program Prioritas tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat isu, lintas urusan/sektor, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.
2. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan sasaran nasional dalam RKP 2022.
3. Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan berdasarkan arahan dan/atau instruksi Presiden.

4. Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat.
5. Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan.
6. Memerlukan tindak lanjut berupa kebijakan publik yang dikeluarkan dan dikoordinasikan lintas sektoral.
7. Suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
8. Dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.







NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
1.	<b>Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi</b>	Rancangan Perpres Rencana Aksi Nasional Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan izin Prakarsa RAN PPAKP</li> <li>2. Penyelesaian pengaduan pelaut dan ABK pada website resmi Kemenko Marves</li> <li>3. Penyelenggaraan Annual Southeast Asia Forum on Sustainable Capture Fisheries (ASEAF-SCF): Leveraging Southeast Asia Business Competitiveness through Combating IUU Fishing and Protecting Human Rights in Fisheries;</li> <li>4. Pembentukan Tim Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pelindungan Pekerja Sektor Perikanan Khususnya yang Bekerja di atas Kapal Penangkapan Ikan Penyelenggaraan Southeast Asia Forum on Fisheries;</li> <li>5. Penyelenggaraan Southeast Asia Forum on Fisheries</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya rekomendasi kebijakan hasil harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan di sektor perikanan khususnya yang terkait pelindungan pekerjaan sektor perikanan, khususnya yang bekerja di atas kapal penangkap ikan agar peraturan perundang-undangan Indonesia dapat selaras dengan standar di Konvensi ILO 188 pada bulan Maret sampai September 2022;</li> <li>2. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan terkait inspeksi Bersama Kementerian / Lembaga terkait di atas kapal penangkap ikan pada bulan Maret sampai September 2022</li> </ol>	Memberikan arahan strategis bagi K/L dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka memberikan pelindungan bagi pelaut dan awak kapal perikanan



PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian/ Lembaga terkait yang melaksanakan operasi dan pengawasan pelaut dan awak kapal perikanan;</li> <li>2. Pemerintah Provinsi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>3. Pemerintah Kabupaten/ Kota yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>4. Sektor Ketenagakerjaan Indonesia;</li> <li>5. Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>6. Masyarakat yang berprofesi sebagai awak kapal perikanan.</li> </ol>	<p>Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekonomian nasional</p>	<p>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</p>	<p>Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan</p>	<p>Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan</p>

NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
2	<b>Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi</b>	Koordinasi Penyelenggaraan Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) Tahun 2022	Penyelenggaraan Archipelagic and Island States Forum dengan Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting) AIS Forum dan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting) AIS Forum	Terselenggaranya Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum tingkat SOM dan MM) pada Bulan November Tahun 2022	<p>Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seiring dengan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, telah menginisiasi pembentukan Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum / AIS Forum) semenjak tahun 2017.</p> <p>Pembentukan forum ini didasari kesamaan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara pulau kepulauan di seluruh dunia.</p> <p>Rencana Penyelenggaraan KTT AIS Forum Tahun 2022 akan menjadi dasar bagi komitmen besar bersama akan kerja sama nyata antara negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia pada empat area utama (implementasi ekonomi biru, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanggulangan polusi laut (terutama sampah plastik di laut), serta tata kelautan dan kemaritiman yang lebih baik)</p>
3	<b>Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi</b>	Koordinasi Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut untuk Segmen Selatan Jawa – Nusa Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut untuk Segmen Selatan Jawa – Nusa Tenggara</li> <li>2. Penyampaian Dokumen Submisi kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS)</li> <li>3. Koordinasi Pelaksanaan Survei di area of interest.</li> </ol>	Data Batimetri seluruh wilayah Indonesia yang terintegrasi melalui sistem batimetri nasional pada Bulan September 2022	<p>Indonesia sebagai negara pihak UNLCOS 1982 berhak mengajukan perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Perluasan hak berdaulat ini penting bagi Indonesia agar Indonesia bisa mengatur, menjaga, dan memanfaatkan secara berkelanjutan potensi (migas, mineral, dan sumber daya hayati) di area tersebut demi kemakmuran rakyat dan kemajuan negara ke depannya.</p>



PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Indonesia;</li> <li>2. Negara-negara peserta AIS Forum;</li> <li>3. Kementerian/Lembaga pelaksana diplomasi maritim;</li> <li>4. Pemangku kepentingan terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Sekretaris AIS);</li> <li>5. Masyarakat Pesisir, Kemaritiman, dan Kelautan Nasional;</li> <li>6. Pimpinan sebagai bahan rekomendasi kebijakan.</li> </ol>	<p>Teguhnya jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat</p>	<p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Optimalnya Kebijakan Luar Negeri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional</li> <li>2. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian dan Lembaga pelaksana urusan Kementerian, terkait pengelolaan batas laut dan pengembangan Kawasan perbatasan;</li> <li>2. Pelaksana diplomasi maritim terkait batas terluar zona maritim Indonesia;</li> <li>3. Kementerian teknis dan Lembaga riset dan pengkajian;</li> <li>4. Pemangku kepentingan terkait (pihak swasta dan pemerintah pusat dan daerah) Pimpinan sebagai bahan rekomendasi kebijakan bidang Kedaulatan Maritim dan Energi</li> </ol>	<p>Teguhnya jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat</p>	<p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Optimalnya Kebijakan Luar Negeri</p>	

NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
4.	<b>Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Sinergi Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembaruan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia</li> <li>2. Koordinasi penyelenggaraan dan Integrasi Data Batimetri Indonesia ke dalam sistem batimetri nasional</li> </ol>	Data Batimetri seluruh wilayah Indonesia yang terintegrasi melalui sistem batimetri nasional pada Bulan September 2022	<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara. Sebagai negara anggota dari UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah perairan yang terdiri atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Di samping itu, kedaulatan Indonesia juga mencakup dasar laut dan seisinya, serta ruang udara di atas dari wilayah perairan tersebut, bahkan sampai seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.</p> <p>Data Batimetri (kedalaman laut) merupakan salah satu data dasar di dalam pengelolaan dan pembangunan kemaritiman, seperti pembangunan kawasan pesisir, penentuan alur laut pelayaran, penetapan rencana tata ruang laut, dan lain sebagainya. Saat ini, data batimetri Indonesia dikumpulkan secara parsial dan tidak terintegrasi oleh pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian/ Lembaga/TNI, BUMN, Swasta dan kalangan akademik. Hal ini perlu dikoordinasikan di tingkat nasional agar seluruh data batimetri yang tersedia akan dapat tersaji dalam satu basis data nasional yang terintegrasi.</p>
5.	<b>Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim</b>	Koordinasi Percepatan Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam RTRW Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Sinkronisasi Program Bidang PRZ dgn PRL KKP;</li> <li>2. Rakor Penyelesaian isu terkait RZWP3K (Prov Kepri dan/atau Bali)</li> <li>3. Rakor Percepatan RZWP3K lainnya (Pertek MKP, Persub ATR, Evaluasi Kemendagri)</li> <li>4. Rakor penyelesaian isu terkait integrasi RZ-RTR.</li> </ol>	<p>Output: Dokumen Peraturan Daerah RTRW Hasil Integrasi Daratan dan Laut Provinsi</p> <p>Target 2022: 6 (enam) RTRW Provinsi Terintegrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang terdapat di daratan dan di laut agar dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai peruntukannya (zonasi);</li> <li>2. Sebagai landasan bagi pemberian izin pemanfaatan ruang laut (KKPRL);</li> <li>3. Meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan</li> </ol>



PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
<p>1. K/L di bawah koordinasi yang akan melaksanakan kebijakan antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan orologylogi Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Pusat Hidro-Oceanografi TNI-AL;</p> <p>2. Penerima Manfaat Lain (Pemda/Instansi/ pihak swasta/masyarakat) antara lain : Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pihak Swasta, Masyarakat;</p> <p>3. Penerima Manfaat Internal Kemenko Marves antara lain: Unit Kedeputan lingkup Marves dan Setmenko.</p>	<p>Teguhnya jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat</p>	<p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Konsolidasi Demokrasi</p>	
<p>K/L, pemerintah daerah, pelaku usaha, nelayan, pembudidaya, masyarakat adat, dan masyarakat pada umumnya</p>	<p>Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam</p>	<p>Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</p>	<p>Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan</p>	<p>Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut</p>

NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
6.	<b>Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim</b>	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Blue Halo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi internal pembahasan Blue Halo.</li> <li>2. Menyusun matriks kriteria WPP NRI, sebagai dasar pemilihan lokasi <i>Pilot Project</i> Blue Halo</li> <li>3. Penyiapan rencana dan pelaksanaan soft launching pilot project</li> <li>4. Workshop Rencana Aksi Implementasi pilot project Blue Halo</li> <li>5. Kajian awal spillover dan kelimpahan jenis ikan di lokasi <i>Pilot Project</i> Blue Halo dan kawasan perairan sekitarnya</li> <li>6. Menyusun proposal detail dan strategi pembiayaan untuk diusulkan ke Blue Halo Blended Finance</li> <li>7. Mengawal dan mendorong proses internalisasi program pilot project Blue Halo kedalam skema pembiayaan G20 &amp; SDGS, sebagai inisiatif pembiayaan implementasi Blue Halo.</li> <li>8. Menyusun draf payung hukum operasionalisasi dan pembiayaan pilot project Blue Halo.</li> <li>9. Workshop Rencana Aksi Implementasi Blue Halo 2023 – 2025</li> <li>10. Launching Blue Halo Project di Indonesia</li> <li>11. Workshop evaluasi pilot project dan persiapan launching Blue Halo Project di Indonesia.</li> </ol>	<p>Output: Dokumen Peraturan Presiden tentang Pendanaan Ekonomi Biru Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Kawasan Konservasi Perairan dan Ekosistem Laut.</p> <p>Target 2022: Penetapan Dokumen Peraturan Presiden tentang Pendanaan Ekonomi Biru Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Kawasan Konservasi Perairan dan Ekosistem Laut</p>	Peningkatan kontribusi perikanan pembangunan nasional



PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pemda, KKP, PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemen PUPR, Kemen BUMN, Pelaku usaha perikanan tangkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis;</li> <li>2) Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam</li> </ol>	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	

NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
7.	<b>Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim</b>	Koordinasi Pengembangan Cluster Perikanan Budidaya Unggulan pada 6 Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Penyusunan dan Penetapan Agenda Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan (Tawar, Payau, Laut);</li> <li>2. Rakor Tindak Lanjut Pengembangan Seaweed Estate Terintegrasi Hulu Hilir;</li> <li>3. Rakor Pengembangan Model Korporasi Budidaya pada Klaster Budidaya Unggulan;</li> <li>4. Rakor Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Budidaya;</li> <li>5. Rakor Dukungan Infrastruktur Klaster Budidaya Unggulan;</li> <li>6. Rakor Pengembangan sistem Distribusi, Hilirisasi, dan Pemasaran Hasil Budidaya;</li> <li>7. Rakor Pengembangan Model Kerjasama Swasta dan Pembudidaya pada Klaster Budidaya Unggulan;</li> <li>8. Rakor Pengembangan Akses Permodalan Budidaya;</li> <li>9. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan (Tawar, Payau, dan Laut).</li> </ol>	<p>Output: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Klaster Perikanan Budidaya Unggulan</p> <p>Target 2022: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Klaster Perikanan Budidaya Unggulan Berbasis pada TW.IV</p>	Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 8,69 Juta Ton dan klaster komoditas unggulan sebesar 30 klaster pada tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN



PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pelaku Usaha Budidaya, Pemda, KKP, Kemen PUPR, Kemen Perdagangan, dan Kemen Desa.	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
8.	<b>Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim</b>	Koordinasi Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk KP dari Hulu-Hilir yang Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi Penataan dan penerapan regulasi terkait Peningkatan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan pada tingkat pusat dan daerah (di Bandung dan Bali);</li> <li>2. Koordinasi dan monev terkait Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang mutu produk Kelautan dan Perikanan di Tempat Pelelangan/ Pemasaran Ikan Higienis serta Pasar Ikan Modern. (Palembang, Bitung, dan Lampung);</li> <li>3. Koordinasi dan Monev terkait Peningkatan kompetensi dan jumlah/kapasitas petugas mutu produk Kelautan dan Perikanan (Jakarta dan Surabaya);</li> <li>4. Koordinasi dan Monev terkait Peningkatan kemampuan telusur (traceability) dalam rangkaian proses produksi produk kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir (Yogyakarta)</li> <li>5. Koordinasi dan Monev terkait Peningkatan kompetensi dan jumlah laboratorium uji; pemeriksaan mutu produk Kelautan dan Perikanan (Makasar);</li> <li>6. Koordinasi dan Monev terkait Peningkatan Pelayanan Sertifikasi Mutu bagi pelaku usaha (nelayan, petambak, supplier ikan, Unit Pengolahan Ikan (Balik papan)</li> <li>7. Rapat Koordinasi Regional terkait Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan Perikanan yang Terintegrasi dari Hulu sampai Hilir (Aceh, Mataram dan Maluku).</li> </ol>	<p>Output: Rancangan Rekomendasi Kebijakan Tentang Penggunaan Reefer <i>Container</i> Produksi Dalam Negeri untuk Kepentingan Nasional RI</p> <p>Target 2022: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Tentang Penggunaan Reefer <i>Container</i> Produksi Dalam Negeri untuk Kepentingan Nasional RI</p>	Mendukung penguatan hilirisasi industri kelautan dan perikanan melalui dukungan terhadap logistik dan rantai pasok dingin sektor produk KP, salah satunya dengan pelaksanaan inovasi untuk produksi reefer <i>container</i> dalam negeri



PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Para pelaku usaha perikanan, Pemerintah Daerah, KKP, Kemendag, dan Kemenperin	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam.	<p>1) Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis; dan</p> <p>2) Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam.</p>	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan

NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
9	<b>Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim</b>	Koordinasi Penguatan Hilirisasi Industri KP berupa Kemudahan Berusaha melalui Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat internal upaya percepatan pembangunan dan sertifikasi ISO, SNI dan TKDN produk reefer container buatan dalam negeri (di Kantor Marves)</li> <li>2. Rapat koordinasi monitoring progres pembangunan dan sertifikasi SNI &amp; TKDN produk reefer <i>container</i> kapasitas 1 dan 5 ton serta kapasitas 20' dan 40' dan rencana pemanfaatan oleh PT PELNI (Persero)</li> <li>3. Rapat koordinasi persiapan rencana uji coba pemasangan mini plan reefer <i>container</i> PT INKA kapasitas 1 ton pada kapal PT PELNI (Persero)</li> <li>4. Rapat koordinasi tindak lanjut rencana uji coba pemasangan mini plan reefer <i>container</i> PT INKA kapasitas 1 ton pada kapal PT PELNI (Persero).</li> <li>5. Kunjungan lapangan dan koordinasi terkait uji coba pemasangan mini plan reefer <i>container</i> PT INKA kapasitas 1 ton pada kapal PT PELNI (Persero) di Indonesia Timur (Saumlaki)</li> <li>6. "Koordinasi dukungan LKPP terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk reefer <i>container</i> buatan dalam negeri.</li> <li>7. Monitoring progres penyelesaian pengurusan sertifikasi ISO, SNI dan TKDN produk reefer <i>container</i> buatan dalam negeri</li> <li>8. Evaluasi kebijakan pemanfaatan reefer <i>container</i> kapasitas kecil untuk mendukung pilot project PT PELNI (Persero) yakni pengadaan reefer <i>container</i> kapasitas kecil untuk angkutan beku di Wilayah Indonesia Timur</li> <li>9. Evaluasi kebijakan pemanfaatan reefer <i>container</i> kapasitas 20' dan 40' ton untuk kebutuhan ekspor serta pemanfaatan reefer <i>container</i> kapasitas 1 dan 5 ton untuk kapal nelayan dan angkutan distribusi .</li> </ol>	<p>Output: Rancangan Rekomendasi Kebijakan Tentang Penggunaan Reefer <i>Container</i> Produksi Dalam Negeri untuk Kepentingan Nasional RI</p> <p>Target 2022: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Tentang Penggunaan Reefer <i>Container</i> Produksi Dalam Negeri untuk Kepentingan Nasional RI</p>	Mendukung penguatan hilirisasi industri kelautan dan perikanan melalui dukungan terhadap logistik dan rantai pasok dingin sektor produk KP, salah satunya dengan pelaksanaan inovasi untuk produksi reefer <i>container</i> dalam negeri

PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Para pelaku usaha perikanan, Pemerintah Daerah, KKP, Kemendag, dan Kemenperin	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis; dan</li> <li>2) Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam.</li> </ol>	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan



NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
10	<b>Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Implementasi Perpres No 87 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Rebanda dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Infrastruktur Perwilayahan dan Penataan Ruang;</li> <li>2. Kebijakan Infrastruktur Perekonomian</li> </ol>	Selesaiannya program/proyek prioritas 1 (P1) pada tahap konstruksi yang telah memenuhi <i>Readiness Criteria</i> .	Termanfaatkannya secara optimal potensi daerah/nasional baik sarana maupun prasarana infrastruktur serta sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional.
11	<b>Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi</b>	Pengendalian Kebijakan Konsolidasi Muatan Balik Program Tol Laut	Kebijakan Sistem Logistik Nasional	Konsolidasi Muatan Balik dengan Stakeholder	Meningkatnya muatan balik, turunnya Biaya Logistik terhadap PDB, meningkatnya daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat.

PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pemerintah, Pelaku Usaha, K/L, masyarakat.	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Wilayah Jawa Bali <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur Pelayanan Dasar.</li> <li>• Infrastruktur Ekonomi</li> <li>• Infrastruktur Perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kawasan Strategis.</li> <li>• Pengembangan Sektor Unggulan.</li> <li>• Pengembangan Kawasan perkotaan.</li> <li>• Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi.</li> <li>• Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi layak dan aman</li> <li>• Konektivitas Jalan</li> <li>• Konektivitas Darat</li> <li>• Transportasi Perkotaan</li> <li>• Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan</li> </ul>
Pemerintah, Pelaku Usaha, K/L, masyarakat	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</li> <li>• Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi</li> <li>• Infrastruktur Ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga</li> <li>• Konektivitas Laut.</li> </ul>

NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
12	<b>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Perhutanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan penetapan Tim Panitia Antar-K/L</li> <li>2. Pembahasan penetapan Izin Prakarsa;</li> <li>3. Rakornis Penyelesaian Batang Tubuh RPerpres tentang Perencanaan Terpadu Perhutanan Sosial;</li> <li>4. Rakornis Penyelesaian Matriks Renaksi RPerpres tentang Perencanaan Terpadu Perhutanan Sosial;</li> <li>5. Penandatanganan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Perhutanan Sosial</li> </ol>	<p>Output: Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Perhutanan Sosial.</p> <p>Target : TW IV 2022.</p>	Mengimplementasikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui perhutanan sosial dan kemitraan konservasi
13	<b>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	Koordinasi Penyusunan Dokumen Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu Hilir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Pokja penyusun Dokumen Strategi Nasional;</li> <li>2. Pembahasan draf dokumen Stranas;</li> <li>3. Penetapan Payung Hukum dokumen Stranas;</li> <li>4. Pembahasan lanjutan draf Stranas;</li> <li>5. Pembahasan payung hukum dokumen Stranas;</li> <li>6. FGD draf Stranas;</li> <li>7. Pemantapan dokumen final Stranas;</li> <li>8. Peluncuran dokumen Stranas</li> </ol>	<p>Output : Tersedianya 1 (satu) Dokumen Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu Hilir.</p> <p>Target : Tersusunnya Dokumen Strategi Nasional Pengembangan Bambu Hulu Hilir.</p>	Dokumen yang akan menjadi pedoman untuk pengembangan pemanfaatan bambu mulai dari sektor hulu sampai dengan pengelolaan di sektor hilir



PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1.KLHK; 2.Kemenkeu; 3. KKP; 4.Kemendikbudristek; 5. Kementerian KumHAM; 6.Kemendes PDDT; 7.Kemenkop UKM; 8.Kementan; 9.Kementerian Perekraf; 10.Kemendagri; 11.KemenPPN/ Bappenas; 12.Kemensetneg; 13.Kemen PUPR; 14.Kemensos; 15.Kantor Staf Presiden; 16.Setkab; 17.Pemerintah Daerah; 18.Akademisi/ Ahli; 19.Masyarakat; 20.Pelaku Usaha	Menciptakan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	Pengentasan Kemiskinan.	Perhutanan Sosial
Masyarakat K/L Teknis Terkait	Meningkatkan produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan.

NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
14	<b>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	Koordinasi <i>Pilot Project</i> Kemitraan Pengusahaan Biomassa (woodchip dan wood pellet) dengan batubara untuk mendukung program <i>cofiring</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengayaan Data;</li> <li>2. Penyusunan Pokja;</li> <li>3. Penyusunan Renaksi;</li> <li>4. Penyusunan konsep business model B2B, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama;</li> <li>5. Peluncuran <i>Pilot Project</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Pokja;</li> <li>2. Renaksi.</li> </ol>	Model kerja sama pengusahaan kehutanan dan Pertambangan dengan pemanfaatan skema multiusaha kehutanan dan pemanfaatan lahan reklamasi pada kawasan hutan dan area pemanfaatan lain yang dapat diduplikasi pada daerah-daerah lain.
15	<b>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	Koordinasi Penyusunan RPP Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya	RPP Pengelolaan Sumber Daya Air	Percepatan penyelesaian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air agar dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan secara berkelanjutan
16	<b>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	Koordinasi Percepatan Penanganan Sampah di Kota Denpasar	Penanganan sampah melalui pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah	Output Terlaksananya pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah di 3 (tiga) lokasi di Kota Denpasar	Optimalisasi Penanganan Sampah di Hilir, dan memitigasi volume sampah yang diangkut ke TPA

PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Masyarakat K/L teknis Pemerintah Daerah	Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan
Masyarakat K/L Teknis Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Kemen PUPR;</li> <li>2.Kementan;</li> <li>3.Kemendagri;</li> <li>4.Kemen LHK;</li> <li>5.Kemen ATR/BPN;</li> <li>6.Bappenas;</li> <li>7.Kemenkeu;</li> <li>8.Kementerian ESDM;</li> <li>9.Kemendag</li> <li>10.Kemeninves/BKPM</li> <li>11.Kementerian Perindustrian;</li> <li>12.Kemenkum dan HAM;</li> <li>13. BMKG;</li> <li>14. BRIN</li> </ol>		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pemerintah Daerah Kota Denpasar;</li> <li>2. Pemerintah Provinsi Bali;</li> <li>3.KLHK;</li> <li>4.Kemendagri;</li> <li>5.Kemen PUPR;</li> <li>6.Kemen PPN;</li> <li>7. Offtaker</li> </ol>	Meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia	Meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penanggulang an pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup



NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
17	<b>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi program pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis <i>mangrove</i> seluas 12.500 Ha berdasarkan RPJMN 2020- 2024 dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2022;</li> <li>2. Penyusunan Kelompok Kerja Mangrove Nasional 2022;</li> <li>3. Koordinasi Penyusunan Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional dengan mengacu kepada RPJMN 2020- 2024</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian target luasan rehabilitasi <i>mangrove</i> dan pemberdayaan an masyarakat tahun 2022 dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024</li> <li>2. Kepmenko Pokja Mangrove Nasional;</li> <li>3. Dokumen Roadmap Rehabilitasi Mangrove</li> </ol>	Pemerintah memiliki target untuk merehabilitasi lahan kritis <i>mangrove</i> seluas 600.000 ha sampai dengan tahun 2024. Pokja Mangrove Nasional dan Roadmap Rehabilitasi akan menjadi acuan/pedoman dalam menjalankan program nasional tersebut
18.	<b>Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	Koordinasi Peningkatan nilai belanja produk dalam negeri dari Pemerintah (K/L-Pemda) dan BUMN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewajibkan belanja pemerintah dari produk dalam negeri dan produk UMK &amp; Koperasi minimal 40% dari anggaran pengadaan barang/jasa dan modal;</li> <li>2. Mengurangi pembelian produk impor pada pengadaan barang/ jasa pemerintah;</li> <li>3. K/L dan Pemdayang mengusulkan impor harus membuat kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor s.d 5% pada tahun 2023;</li> <li>4. Mengembangkan government marketplace yang mudah diakses untuk mempertemukan suplai produk dalam negeri dengan permintaan dari K/L dan Pemda</li> </ol>	Jumlah belanja barang dan jasa produk dalam negeri sebesar Rp400 T.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan belanja pemerintah melalui produk dalam negeri minimal Rp400 triliun.</li> <li>2. Mengurangi produk impor dalam belanja pemerintah</li> <li>3. Mendukung penguatan supply dari industri dan umkm dalam meningkatkan kapasitas &amp; pengembangan industri baru.</li> <li>4. Menciptakan permintaan bagi industri &amp; umkm yang menghasilkan produk dalam negeri.</li> </ol>
19	<b>Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan</b>	Rekomendasi Kebijakan PDB Kemaritiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Standar Data Statistik dan Metadata Statistik;</li> <li>2. Pembuatan <i>Dashboard</i> Satu Data Statistik Kemaritiman;</li> <li>3. Penyusunan PDB Kemaritiman Tahun 2022.</li> </ol>	Dokumen Strategis PDB Kemaritiman 2010 – 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan keputusan yang informatif serta perumusan kebijakan yang tepat dalam mengembangk an bidang kemaritiman di Indonesia;</li> <li>2. Terwujudnya satu data statistik kemaritiman</li> </ol>

PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian ESDM;</li> <li>2. Kemen PUPR;</li> <li>3. Kemenhub;</li> <li>4. KLHK;</li> <li>5. KKP;</li> <li>6. Kemendagri;</li> <li>7. Kemenlu;</li> <li>8. PPN/Bappenas;</li> <li>9. BRIN.</li> </ul>		Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro Kecil;</li> <li>2. Koperasi;</li> <li>3. Negara;</li> <li>4. Masyarakat;</li> </ul>	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif yang berdaya saing	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan ekspor bernilai Tambah dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	Peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Republik Indonesia;</li> <li>2. Kementerian PPN/ BAPPENAS;</li> <li>3. Badan Pusat Statistik.</li> </ul>	Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekonomian nasional	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir

NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA 2022	OUTPUT & TARGET	URAIAN MANFAAT
20.	<b>Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan</b>	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan One Single Submission (OSS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Tindak Lanjut Penyelenggaraan Teknologi Informasi OSS RBA;</li> <li>2. Konsinyering Integrasi Sistem OSS-RBA dengan Sistem GISTARU;</li> <li>3. Rapat Bilateral dengan PUPR terkait Integrasi OSS-RBA dengan SIMBG;</li> <li>4. Rakor Implementasi Sistem OSS-RBA dengan Kementerian Investasi/ BKPM dan Kementerian LHK.</li> </ol>	Rekomendasi Kebijakan OSS-RBA dengan GISTARU dan Amdal	Banyaknya proses perizinan dinilai cukup menyita banyak waktu, disamping itu terdapat juga beragam jenis perizinan yang dikeluarkan oleh masing-masing K/L dan Pemda. untuk itu setiap proses dan jenis perizinan tersebut harus segera terintegrasi pada sistem OSS yang memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku
21.	<b>Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan</b>	Rekomendasi Kebijakan Investasi Industri Hijau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinai Revisi RTRW;</li> <li>2. Koordinasi revisi rdtr kab bulungan;</li> <li>3. Studi Kab Bulungan ke KIT Batang;</li> <li>4. Koordinasi Masterplan wilayah KIPi – KIKI;</li> <li>5. Koordinasi perizinan pembangunan PLTA;</li> <li>6. Koordinasi Teknis Pembangunan Pelabuhan.</li> </ol>	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Perizinan Investasi Kawasan Industri Hijau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Realisasi Investasi Indonesia;</li> <li>2. Terwujudnya industri yang mendukung ketahanan energi dalam perubahan iklim;</li> <li>3. Kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berbasis energi hijau;</li> <li>4. Pemerataan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di luar Jawa;</li> <li>5. Peningkatan Industri yang berteknologi tinggi.</li> </ol>



PENERIMA MANFAAT	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (DALAM RENSTRA 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
		PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pemerintah Daerah, BKPM, Kemenko Perekonomian KLHK, PUPR, Badan Usaha	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Investasi/ BKPM;</li> <li>2. Kementerian Perindustrian;</li> <li>3. Kementerian ESDM;</li> <li>4. Kemenaker;</li> <li>5. Kemenhub;</li> <li>6. Kementerian PUPR;</li> <li>7. Kemen ATR/BPN;</li> <li>8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;</li> <li>9. Pemerintah Kabupaten Bulungan</li> </ol>	Menguatnya jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi.	Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa.



## 1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

### a) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan

#### Progres Capaian

Telah disusun Draft Keputusan Menteri Koordinator tentang Tim Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Pekerja Sektor Perikanan Khususnya yang Bekerja di Atas Kapal Penangkapan Ikan.

**Capaian : 100%**

#### Tindak Lanjut

1. Meningkatkan perlindungan terhadap pekerja sektor perikanan dan pengolahan produk perikanan khususnya di kawasan Asia Tenggara yang mengedepankan penghormatan hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak



2. Mendorong ratifikasi konvensi C-188 sebagai perangkat perlindungan terhadap pekerja sektor perikanan bagi negara-negara yang belum meratifikasi.

## b) Penyelenggaraan Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) Tahun 2022

### Progres Capaian

Telah Terselenggaranya Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum tingkat SOM dan MM) pada Tanggal 5-6 Desember Tahun 2022 dengan melibatkan 21 Negara, 2 Menteri, 60 Delegasi, dan 2 organisasi internasional.

### Capaian: 100%

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan strategis berupa :

1. Menegaskan kesungguhan untuk mempererat kerja sama dan melakukan kolaborasi sesuai area kerja sama AIS Forum
2. Mendorong inovasi dan penguatan pembiayaan program kelautan berkelanjutan terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi biru guna mendukung kesejahteraan Bersama
3. Menyatakan kesepahaman bersama, dan komitmen memperkuat kelembagaan kerja sama AIS Forum
4. Menyetujui serta memberikan mandate kepada Indonesia untuk melaksanakan pertemuan pertama tingkat Kepala Negara dari forum negara-negara pulau dan kepulauan.

Selain kesepakatan strategis, perwakilan negara 21 negara pulau dan kepulauan menyambut baik komitmen Pemerintah Indonesia melanjutkan pembiayaan dan fasilitasi program dan aktivitas sekretariat AIS Forum.







### Faktor Pendukung

Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Marves melakukan berbagai persiapan untuk penyelenggaraan AIS Forum dengan berkoordinasi dengan berbagai K/L terkait, perwakilan KBRI yang ada di negara AIS untuk mendorong kehadiran para delegasi perwakilan negara-negara AIS Forum

### Tindak Lanjut

1. Usulan pelaksanaan Rapat Terbatas (Ratas) terkait AIS Forum untuk memutuskan kebijakan strategis terkait dengan pelaksanaan Pertemuan Tingkat Tinggi AIS Forum
2. Keberlanjutan dukungan pendanaan kegiatan AIS Forum
3. Pembentukan regulasi nasional guna memastikan keberlanjutan diplomasi maritime Indonesia melalui AIS Forum, diskusi kajian urgensi dan naskah awal rancangan regulasi.







**c) Koordinasi Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk segmen selatan Jawa - Nusa Tenggara**

**Capaian: 100%**

1. Tersusunnya Dokumen Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen selatan Jawa Nusa Tenggara
2. Tersampainya Dokumen Submisi kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB

**Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari segi hukum maupun ilmiah (geomorfologi, geodesi, dsb.) Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan hak untuk wilayah dasar laut (landas kontinen) di selatan Jawa-selatan Nusa Tenggara seluas 245.711 km<sup>2</sup>, submisi segmen selatan Jawa-selatan Nusa Tenggara ini menjadi klaim terluas yang pernah diajukan oleh Indonesia kepada UN-CLCS. Hasil tersebut diraih dari kerja keras bersama lintas K/L yang didukung para pakar dan akademisi anak bangsa mulai tahun 2008 yang kemudian diaktifkan dan diakselerasi kembali semenjak 2018



oleh Kemenko Marves tanpa bantuan tenaga asing.

**Success Story**

Diterimanya dokumen dimaksud menggenapkan total luas submisi perluasan landas kontinen Indonesia menjadi 653.677 km<sup>2</sup> atau sepertiga dari luas daratan Indonesia.

**Tindak Lanjut**

Di kesempatan yang sama, Delegasi Pemri yang terdiri dari perwakilan Kemenko Marves, Kementerian Luar Negeri, Badan Informasi Geospasial, dan Pusat Hidro-Oseanografi juga memenuhi undangan dari UN-CLCS untuk mempresentasikan submisi parsial ketiga perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut Indonesia, yakni untuk segmen barat

daya Sumatra, pada pertemuan ke-55 UN Commission on the Limits of the Continental Shelf (UN-CLCS). Presentasi dilakukan secara tertutup pada tanggal 11 Agustus 2022 dimulai pukul 10.00 bertempat di Markas Besar PBB, New York, dan dihadiri oleh 20 orang anggota UN-CLCS.



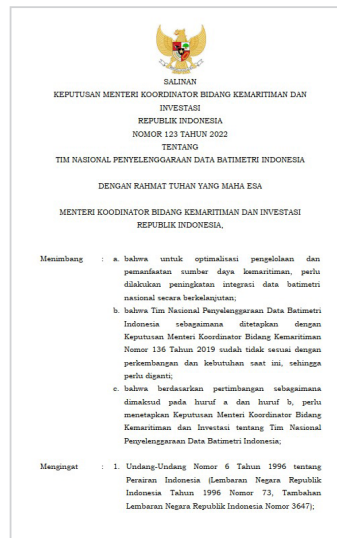
#### d) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Sinergi Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia

**Capaian: 100%**

Penandatanganan Keputusan Menko Kemaritiman dan Investasi Nomor 123 tahun 2022 tentang Tim Nasional Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2022

#### Tindak Lanjut

1. Pendataan dan penyusunan nama-nama personel teknis sesuai dengan bidang dan posisinya.
2. Tim Teknis memulai Pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan bidang teknis masing-masing dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Ketua Pelaksana.







## 2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

- a) Koordinasi Percepatan Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam RTRW Provinsi

### Progres Capaian

- Telah terbit 2 Perda RTRWP terintegrasi untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No 3 Tahun 2022) dan Provinsi Papua Barat (Perda No 3 Tahun 2022).
- Telah terbit Persetujuan Teknis dari Menteri KKP (Pertek) untuk materi teknis muatan perairan pesisir yang siap diintegrasikan dengan muatan darat untuk 16 Provinsi (Banten, DIY, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan)

**Capaian: 100%**

Dokumen Peraturan Daerah dan Surat Persetujuan Teknis dari MKP





### Faktor Pendukung

- Koordinasi yang intens terkait penyelesaian isu yang berkembang saat penyusunan rencana tata ruang
- Komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan penyusunan dokumen rencana tata ruang
- Partisipasi aktif dan kerjasama yang baik dari Pemda, K/L dan *stakeholder* terkait untuk penyempurnaan dokumen rencana tata ruang

### Faktor Penghambat

Masih ada ketidaksinkronan program antara pemerintah daerah dengan rencana tata ruang nasional

### Success Story

- Dengan terbitnya Perda RTRWP, maka pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di daratan dan di laut dapat termanfaatkan secara optimal dan minim konflik antar *stakeholder* pemanfaat
- Adanya kepastian hukum sebagai landasan pemberian izin pemanfaatan ruang dan ruang laut



- Meningkatnya investasi di sektor kelautan dan perikanan

### Tindak Lanjut

1. Mendorong percepatan penetapan Perda RTRWP untuk provinsi lainnya
2. Mengawal penyusunan materi teknis muatan perairan pesisir dan proses integrasinya
3. Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut



## b) Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan *Blue Halo-S*

### Progres Capaian

- Ranperpres telah dibahas bersama-sama dengan K/L terkait dan sudah diusulkan kepada Presiden. Sudah dilakukan rapat klarifikasi oleh Setneg pada 25 Oktober 2022.
- Launching dilaksanakan pada THK forum sebagai *side event* dari KTT G20 yang dihadiri oleh Menko Marves, MenKP, GCF (*Green Climate Fund*) dan *Conservation International*
- Sudah disetujui kerja sama pendanaan melalui GCF berbasis grant yang diumumkan pada *side event* G20 di Bali.
- Komitmen pendanaan tahap awal selama 15 bulan akan dimulai pada Januari 2023 melalui program *Project Preparation Facility* (PPF) di kawasan WPP 572 (Barat Sumatera) sebagai lokasi *pilot project*.

### Capaian : 80%

1. Ranperpres Pendanaan Campuran Ekonomi Biru untuk Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Kawasan Konservasi Perairan dan Ekosistem Laut yang telah diusulkan kepada Presiden dan sudah ditindaklanjuti oleh Setneg
2. *Launching* program *Blue Halo S*
3. Komitmen kerja sama pendanaan dari GCF





### Faktor Pendukung

Terdapat banyak pihak yang tertarik untuk mendukung program *Blue Halo S* baik dari pemerintah pusat dan daerah ataupun dari lembaga di luar pemerintah

### Faktor Penghambat

Dalam proses persetujuan Ranperpres, Bappenas ingin menyelaraskan dengan proses penyusunan peraturan terkait roadmap ekonomi biru yang juga sedang berproses

### Success Story

Program *Blue Halo S* berhasil mendapatkan komitmen pendanaan dari GCF

### Tindak Lanjut

1. Pengawasan progres pengusulan Ranperpres dengan didahului pertemuan bilateral dengan Bappenas
2. Pelaksanaan *Project Preparation Facility* (PPF) untuk pembuatan proposal pendanaan implementasi yang lebih komprehensif
3. Membuka peluang kerja sama pendanaan lain dalam pelaksanaan program *Blue Halo S*





### c) Koordinasi Pengembangan *Cluster* Perikanan Budidaya Unggulan pada 6 Lokasi

#### Progres Capaian

- KKP telah menetapkan Keputusan MenKP Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kampung Perikanan Budidaya dan Kep Men KP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kampung perikanan budidaya;
- 6 Kluster budidaya yang ditetapkan dalam Kepmen tersebut diantaranya : *Cluster* Patin di Oku Timur, *Cluster* Ikan Mas di Pasaman, *Cluster* Ikan Nila di Pati, *Cluster* Ikan Bandeng di Gresik, *Cluster* Lobster di Lombok Timur dan *Cluster* Kerapu di Kupang;
- Kemenko Marves telah menetapkan SK Nomor 41/D2 Tahun 2022 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan;
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara DJPB KKP dengan Pemda Setempat (lokus pengembangan), terkait program kerja pengembangan *cluster* Budidaya unggulan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2022;
- Unit kerja Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya bersama Tim Pokja Kemenko Marves telah melakukan peninjauan lapangan di 6 lokus cluster tersebut;
- Asisten Deputi Pengembangan Perikanan pada rapat kerja DJPB KKP yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 telah menyampaikan poin-poin rekomendasi (berdasarkan hasil tinjauan lapangan) yang perlu segera



► Peninjauan Kampung Budidaya Bandeng Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kab. Gresik



► Pakan Mandiri Kampung Bandeng Gresik



► Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Lahewa



► Dermaga Desa Muzoi, Kecamatan Lahewa



► Lokasi Penangkaran Lobster di Kecamatan Lahewa

ditindaklanjuti oleh unit KKP terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi di masing-masing *cluster*;

- Per Desember 2022, bantuan pengembangan Kawasan untuk ke 6 cluster tersebut telah selesai dilaksanakan. Adapun jenis bantuan yang diberikan mencakup mesin produksi pakan, rehab UPR dan saluran irigasi, bantuan excavator bantuan KJA HDPE, bantuan bansarpras dan inpiut produksi, bantuan kendaraan transportasi roda 3, dukungan permodalan, dan pendampingan korporasi
- Selain 6 lokus *cluster* tersebut, Kemenko Marves juga telah mengkoordinasikan proses investasi swasta untuk pengembangan *cluster seaweed* di Maluku Tenggara. Pada Bulan November 2022 telah diselenggarakan penandatanganan MoU pengembangan lab kultur jaringan antara IPB dengan Investor Swasta;

### Capaian : 100%

1. Telah terbangun 6 cluster budidaya unggulan, yakni *Cluster Patin* di Oku Timur, *Cluster Ikan Mas* di Pasaman, *Cluster Ikan Nila* di Pati, *Cluster Ikan Bandeng* di Gresik, *Cluster Lobster* di Lombok Timur dan *Cluster Kerapu* di Kupang;
2. Telah diperoleh MoU investasi pengembangan Lab Kultur Jaringan di Maluku Tenggara, Kerjasama antara swasta dan perguruan tinggi;



► Bantuan Pompa untuk Klaster Kampung Budidaya Bandeng



► Bantuan alat pembuatan pakan ikan



► Kunjungan di Desa Sineheasi, Penerima Bantuan Cold Storage KKP



► Lokasi Lahan Potensial Budidaya di Kecamatan Afuru





► Dermaga Kecamatan Lahewa

### Faktor Pendukung

- Komitmen kuat oleh unit DJPB KKP selama proses pengembangan. Hal ini ditunjukkan dari konsistensi kebijakan, program dan penganggaran;
- Dukungan kebijakan dan program oleh Pemda setempat. Aksi kolaborasi yang dilakukan selama proses pembangunan sudah sangat baik;
- Komitmen kuat investor untuk mendanai pembangunan lab kultur jaringan di lokus sentra pengembangan seaweed di Indonesia Timur.

### Faktor Penghambat

- Keterbatasan kewenangan dan anggaran, menyebabkan proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, khususnya untuk infrastruktur dasar (akses jalan, kelistrikan dan irigasi utama);
- Proses pembangunan belum menggandeng lebih banyak unit kerja lainnya, sehingga fokus pembangunan lebih berat di proses hulu, sedangkan hilirisasi belum *massive*;



► Lokasi Kandidat Calon Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Lahewa

- Khususnya terkait *cluster* budidaya laut, proses kajian untuk penentuan lokus belum sempurna sehingga pemilihan lokasi saat ini belum sesuai, hasilnya belum optimal;

### Tindak Lanjut

1. Kemenko Marves akan terus memonitoring proses produksi yang berlangsung, hal ini dimaksudkan untuk memastikan outcome yang dihasilkan mampu mencapai target;
2. Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan K/L terkait untuk memastikan dukungan infrastruktur dasar di masing-masing lokus;
3. Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan K/L terkait untuk memperkuat kelembagaan korporasi pembudidaya di masing-masing lokus



d) **Koordinasi Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dan Perikanan dari Hulu ke Hilir yang Terintegrasi**

**Progres Capaian**

- Rakor Penataan Regulasi Mutu
- Rakor dan Kunjungan Lapangan terkait Pemanfaatan Sarana Prasarana Penunjang Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- Rakor terkait Kompetensi Petugas Mutu
- Rakor terkait Pelayanan Sertifikat Mutu

**Capaian: 80%**

Rekomendasi Kebijakan Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu ke Hilir yang Terintegrasi

**Faktor Pendukung**

Setiap K/L dan *stakeholders* yang terlibat sangat kooperatif, khususnya saat diadakannya rapat-rapat koordinasi

**Faktor Penghambat**

- Implementasi peraturan mutu di daerah belum seluruhnya berjalan



- Pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang mutu produk kelautan dan perikanan belum optimal
- Jumlah dan kompetensi petugas mutu masih minim serta sering berpindah tugas
- Penerapan sertifikasi mutu belum terlaksana secara menyeluruh
- Dukungan anggaran kurang memadai



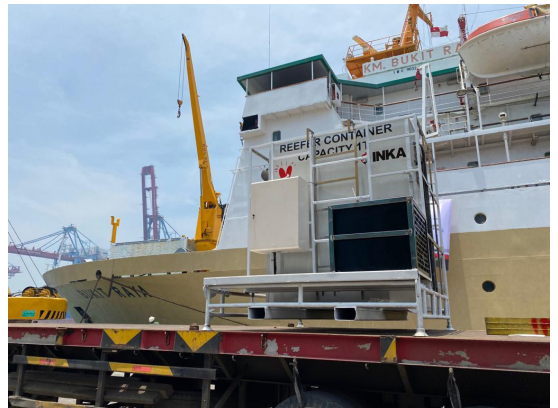
## Tindak Lanjut

1. Perlu mendorong peningkatan standar kompetensi dan petugas mutu
2. Perlu mendorong pengembangan laboratorium uji mutu produk kelautan dan perikanan
3. Koordinasi, sinkronisasi dengan Bappenas terkait pemenuhan kebutuhan penerapan sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan

## e) Koordinasi Penguatan Industri KP berupa Kemudahan Berusaha Melalui Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri

### Progres Capaian

- Telah terbangun *prototipe reefer container* buatan dalam negeri produksi PT INKA kapasitas 1 dan 5 ton yang telah diuji coba pada armada PELNI yakni KM Bukit Raya dan KM Awu
- Hasil uji coba pada armada PELNI menunjukkan hasil yang positif dimana mencapai suhu target yang diinginkan dengan sistem IoT yang dipadang pada *reefer container* selama pengujian berjalan dengan baik
- Telah terbit sertifikat TKDN *reefer container* 1 ton (30.45%) dan 5 ton (52.43)
- Telah dilakukan penandatanganan MoU antara PT INKA, PT PELNI dan ITS untuk kerja sama sistem rantai dingin perikanan yang akan menjadi payung hukum pembangunan *reefer container* buatan dalam negeri kedepannya.
- Saat ini sedang dilakukan kerja sama pengadaan 62 unit reefer





container antara PT INKA dan PT PELNI untuk memenuhi kebutuhan sarana pendingin pada armada PT PELNI

### Capaian : 95%

1. Dokumen sertifikat TKDN produk reefer container 1 ton
2. Dokumen sertifikat TKDN produk reefer container 5 ton
3. Dokumen Nota Kesepahaman antara PT PELNI, PT INKA dan ITS tentang Sinergi Sarana Logistik BUMN dan Pergutuan Tinggi
4. Surat Dukungan Bagi Pemanfaatan Hasil Produk Buatan Dalam Negeri

### Faktor Pendukung

- Arahan Presiden Republik Indonesia kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Provinsi Bali, 25 Maret 2022 Tentang Peningkatan Produksi/



Pemanfaatan dan Belanja Barang/ Jasa Pemerintah

- Keputusan Presiden RI No. 24 Th 2018 tentang Tim Nasional TKDN dimana Menko Marves sebagai Ketua Timnas TKDN

### Faktor Penghambat

Belum terlaksananya optimalisasi pemanfaatan reefer container buatan dalam negeri oleh pelaku industri yang menjadi tujuan utama atas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Marves dalam rangka mendinging isu tersebut sebagai dukungan pemerintah dalam upaya pemenuhan container berpendingin untuk produk kelautan



perikanan dan produk agro maritim lainnya

### Success Story

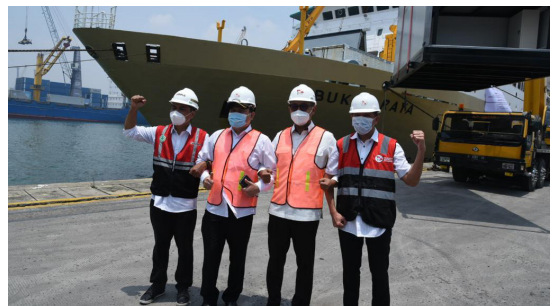
- Terbangunnya *reefer container* produksi PT INKA 1 dan 5 ton  
Telah dilakukan uji coba pemanfaatan *reefer container* 1 dan 5 ton pada KM Bukit Raya dan KM Awu yang berjalan dengan baik
- Terbitnya sertifikat TKDN *reefer container* 1 ton (30.45%) dan 5 ton (52.43)
- Telah ditandatangani MoU antara PT INKA, PT PELNI dan ITS untuk kerja sama sistem rantai dingin perikanan yang akan menjadi payung hukum pembangunan *reefer container* buatan dalam negeri kedepannya

### Tindak Lanjut

1. Kemenko Marves akan mendorong pemanfaatan *reefer container* kapasitas 20 feet produksi PT INKA dengan melakukan kerja sama dengan PT PELNI dalam

memenuhi kebutuhan *reefer container* PT PELNI dengan jumlah 62 unit yang saat ini sedang dalam proses pengadaan

2. Dengan meninjau data kebutuhan *reefer container* secara nasional, diperkirakan masih ada sekitar 40% potensi pembangunan inovasi rc buatan dalam negeri, sehingga Kemenko Marves akan mendorong industri dalam negeri untuk mengoptimalkan pembangunan *reefer container* buatan dalam negeri
3. Akan mendorong percepatan sertifikasi TKDN produk *reefer container* kapasitas 20 feet





### 3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

#### a) Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Implementasi Perpres No 87 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan

##### Progres Capaian

1. Serah terima Tanah Polman II Majalengka dihadiri Menko Marves (8 Februari 2022)
2. Validasi Tambahan RC (16-17 Februari 2022)
3. Rakor Kawasan Industri Subang (7 Juni 2022)
4. Peningkatan Kapasitas Desa Digital (20-21 Juli 2022)
5. Rapat Pendanaan Polman II Majalengka (16 September 2022)
6. Rapat Tindaklanjut Dokumen RC Proyek P1 (20 September 2022)
7. FGD Pengembangan Desa Konservasi tanggal (29 September 2022)





8. Undangan Rapat Proyek yang ditangani oleh Kementerian Pertanian (3 Oktober 2022)
9. Kunjungan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Petani (27 Oktober 2022)
10. FGD Bidang Pariwisata Dan Pertanian (16-17 November 2022)

### Capaian: 78,57%

- Hasil Validasi 17 Januari 2022, hanya 5 Proyek P1 yang memenuhi kelengkapan dokumen *Readiness Criteria* oleh BPKP.
- Hasil Validasi tambahan 18 Februari 2022, sebanyak 42 proyek yang memenuhi kelengkapan dokumen *Readiness Criteria*.
- Sehingga total hasil reviu *Readiness Criteria* SEBANYAK 47 PROYEK P1

### Faktor Pendukung

Terjalin Koordinasi yang baik antar *stakeholder*

### Faktor Penghambat

- Permasalahan terkait Pembebasan lahan
- Kab Subang - belum ada koordinasi lebih lanjut dengan Dinas KP Provinsi Jawa Barat untuk skema pendanaan oleh APBD
- Jumlah wilayah *blank spot* berdasarkan IDM (2021) di Kawasan Jabar Selatan sebanyak 322 Desa dan Kawasan Rebana sebanyak 148 Desa.
- Terdapat 170 desa di Kawasan Rebana dan Jabar selatan yang telah memiliki infrastruktur digital namun belum mendapatkan literasi digital



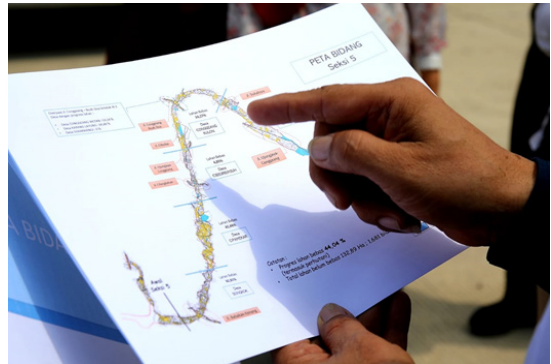


### Success Story

- Status Selesai (berdasarkan hasil Reviu BPKP, Klarifikasi K/L, dan Pemda)
- 1. Pelebaran Jalan Pangkalan Damri-Kiarapayung (*Exit Ramp* Cisumdawu-Jatinangor
- 2. Reaktivasi Jaringan Rel KA Cikajang
- 3. Pelebaran Jalan Pangkalan Damri-Kiarapayung (*Exit Ramp* Cisumdawu-Jatinangor
- 4. Reaktivasi jaringan KA cikajang

### Tindak Lanjut

- Tahap Konstruksi Selesai ≤ 2024
- 1. Pelebaran Ruas Jalan Cipasung-Subang-Cilebak (Kab. Kuningan) -Kutaagung/Dayeuh Luhur (Kab. Cilacap)
- 2. Pembangunan Breakwater Pantai Timur Pangandar



- 3. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang- Dawuan (Seksi 3-6)
- 4. Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan
- 5. Pengembangan Desa Digital
- 6. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhanratu
- 7. Pengembangan Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Jatigede
- 8. Pengembangan Rumah Sakit Cideres Tipe B

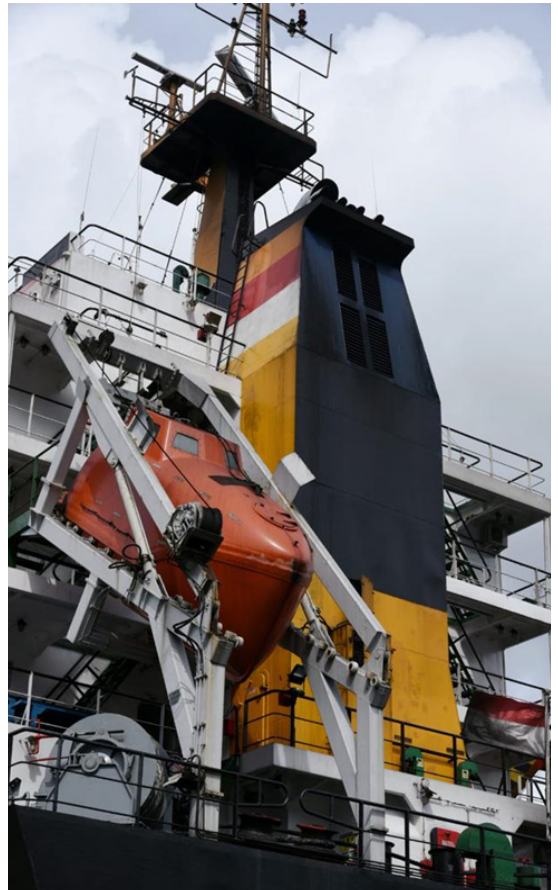




## b) Pengendalian Kebijakan Konsolidasi Muatan Balik Program Tol Laut

### Progres Capaian

- Program Tol Laut telah mencakup 86 Kabupaten di Indonesia, yang terdiri atas 12 Kabupaten di Sumatera, 2 Kabupaten di Kalimantan, 18 Kabupaten di Sulawesi, 13 Kabupaten di Nusa Tenggara, 15 Kabupaten di Kepulauan Maluku, dan 26 Kabupaten di Papua.
- Total Muatan Ternak yang diangkut sampai dengan bulan November 2022 sebanyak 39.460 ekor dan terbanyak berasal dari di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 26.942 ekor. (Lampiran III).
- Realisasi muatan berangkat untuk barang sampai dengan Bulan November tahun 2022 sebesar



19.320 Teus. Persentase terbesar berasal dari jenis Barang Lainnya, dengan terbanyak air mineral, makanan ringan, dan minuman ringan. Sedangkan Realisasi muatan balik untuk barang sebesar 6.252 Teus.

### Capaian : 78,57%

1. Program tol laut telah memiliki 33 trayek mengalami peningkatan jumlah armada angkutan dan jumlah pelabuhan singgah sejak tahun 2019 – 2022 **(rincian data sudah diberikan berupa ND)**
2. Telah diluncurkan Sistem Informasi Tol Laut (SITOLAUT) yang memudahkan pembeli dalam melakukan *purchase order* untuk dapat memilih sendiri penjual, Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan jadwal kapal melalui

media elektronik. Selain itu, pemerintah juga lebih mudah dalam melakukan pemantauan.

3. Saat ini telah dibangun sebanyak 14 Depo Gerai Maritim dan telah diluncurkan sistem informasi Gerai Maritim (SIGM) melalui <http://www.geraimaritim.kemendag.go.id> untuk memantau kelancaran arus barang, peningkatan perdagangan antar pulau, dan menjaga ketersediaan barang. Perkembangan jumlah pelaku usaha Gerai Maritim mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata peningkatan pelaku usaha sebesar 28,35%.

### Faktor Pendukung

Terjalin Koordinasi yang baik antar *stakeholder*



## Faktor Penghambat

Pada periode Januari – September 2022, perubahan harga tertinggi pada Barang Kebutuhan Pokok terjadi pada komoditi tepung terigu di Kabupaten Supiori

## Success Story

Dengan adanya progress tol laut ini dapat menurunkan harga komoditi barang kebutuhan pokok dengan presentase penurunan 40-50%

## Tindak Lanjut

- Menetapkan Trayek Tol Laut baru berdasarkan usulan trayek dari *stakeholders* yang telah diterima oleh Kementerian Perhubungan.
- kolaborasi dengan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam melakukan pengawasan.
- melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan.
- mendorong peningkatan muatan balik dengan peran aktif Pemerintah Daerah.
- meningkatkan kualitas jaringan internet di daerah 3TP agar bisa digunakan dengan baik



sehingga para pelaku usaha dapat mengakses aplikasi SITOLAUT, SIGM dan aplikasi lain yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang.







#### 4. **Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan**

##### a) **Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial)**

#### **Progres Capaian**

1. Telah tersusun konsep batang tubuh dan rencana aksi
2. Telah terlaksana proses konsultasi publik dan harmonisasi

#### **Capaian: 100%**

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

#### **Faktor Pendukung**

- Pelaksanaan kunjungan lapangan ke daerah dalam menjangring informasi dan masukan pada tingkat tapak



- Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam penyusunan RPerpres
- Dukungan anggaran dari pihak ketiga kepada Kementerian LHK untuk pelaksanaan kegiatan
- Dukungan dari LSM/NGO yang memberi masukan RPerpres baik secara tertulis maupun verbal



### Faktor Penghambat

- Partisipasi dari K/L yang belum menyeluruh untuk mengikuti rangkaian kegiatan koordinasi  
Regulasi dalam pelaksanaan tuisi setiap K/L yang belum mendukung satu sama lain
- Dukungan anggaran bagi Kemenko Marves dalam koordinasi dan fasilitasi kegiatan
- Dukungan anggaran bagi K/L dalam implementasi kegiatan Perhutanan Sosial

LSM, NGO, hingga Perguruan Tinggi dalam mendukung sinkronisasi program dan kegiatan Perhutanan Sosial

- Fasilitasi dan koordinasi memenuhi target waktu penyusunan

### Tindak Lanjut

Hasil harmonisasi dikembalikan kepada pemrakarsa (KLHK) untuk disampaikan kepada Kemensetneg dalam proses penandatanganan/ pengesahan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

### Success Story

- Munculnya inisiasi dan partisipasi dari K/L, Kelompok Masyarakat,





## b) Koordinasi Penyusunan Dokumen Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu Hilir

### Progres Capaian

Final Draft Strategi Nasional Pengembangan Bambu terintegrasi Hulu Hilir

**Capaian : 100%**

### Faktor Pendukung

Dukungan dari para pihak baik dari K/L terkait, Masyarakat, swasta, NGO/LSM dan Pemerintah Daerah

### Faktor Penghambat

Belum adanya rencana jangka panjang terkait bambu didalam dokumen perencanaan

### Success Story

Adanya kabupaten-kabupaten yang menjadikan bambu sebagai HHBK unggulan dan prioritas

### Tindak Lanjut

Penyusunan renaksi dan payung hukum yang akan mengawal implementasi dari Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu Hilir

## c) Koordinasi *Pilot Project* Kemitraan Pengusahaan Biomassa (*woodchip* dan *wood pellet*) dengan batubara untuk mendukung program *cofiring*

### Progres Capaian

- Pokja Model Kebijakan Kemitraan Pengusahaan
- Kajian Model Kebijakan
- Penetapan Lokasi Implementasi Model Kebijakan (pilot project)
- Peluncuran *Pilot Project*
- Penandatanganan NKB dan PKS *Pilot Project*







## Capaian

- K.Pokja Kemitraan : 100%
- Kajian dan *Policy Brief Model* Kebijakan : 100%
- Penetapan lokasi site Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan: 100%
- Peluncuran *Pilot Project* Implementasi Model Kebijakan site Sumatra Selatan (22 Des 2022) : 50%
- Site Kalimantan Timur dijadwalkan pada triwulan 1 2023: 50%
- Final Draf NKB Model Kebijakan.

## Faktor Pendukung

Dukungan dari BUMN, swasta dan Asosiasi terkait (PT.BA, Indika, ITMG, APHI dan APBI)

## Faktor Penghambat

Masih dibutuhkan gugus tugas daerah untuk mengawal implementasi model kebijakan khususnya pada lahan APL

## Success Story

- *Pilot Project* Sumatra Selatan sebagai site yang akan memanfaatkan *cofiring* biomassaxbatubara di PLTU sendiri, juga akan mengembangkan **model persemaian khusus tanaman2 energi**
- Percepatan pemulihan lahan terdegradasi ex pertambangan menjadi model hutan produksi (tanaman energi)

## Tindak Lanjut

- Penandatanganan NKB dan PKS
- Penetapan Gugus Tugas Daerah
- Monitoring dan Evaluasi

## d) Koordinasi Penyusunan RPP Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

### Progres Capaian

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air telah selesai disusun dan saat ini sedang dalam tahap harmonisasi

### Capaian : 100%

Dokumen Rancangan PP tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

### Faktor Pendukung

- Setkab dan K/L terkait terlibat secara aktif dan intens dalam pelaksanaan harmonisasi
- Surat Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan kepada Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham perihal permohonan percepatan proses harmonisasi

### Faktor Penghambat

- Beberapa peraturan antar K/L yang belum sinkron dan memerlukan pendalaman lebih lanjut

- Peserta harmonisasi yang sering berganti dan konssten dalam mengikuti proses harmonisasi

### Tindak Lanjut

Pengawasan proses harmonisasi dan mendorong Kemenkumham untuk menambah intensitas pembahasan RPP Pengelolaan SDA

## e) Koordinasi Percepatan Penanganan Sampah di Kota Denpasar

### Progres Capaian

- Operasional TPST Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur
- Pembangunan fisik selesai di TPST Tahura, Denpasar Selatan
- Pembangunan fisik selesai di TPST Padangsambian Kaja, Denpasar Barat

### Capaian

- Sampah terolah sebanyak 450 ton/hari: 100%
- Sampah terolah sebanyak 450 ton/hari: 100%
- Sampah terolah sebanyak 120 ton/hari: 95%

### Faktor Pendukung

Dukungan dari pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR melalui *loan* ISWMP, dan pemerintah Kota Denpasar.

### Faktor Penghambat

- Tidak ada
- Jadwal pembangunan fisik dan mesin tidak sinkron
- Akses jembatan masih dalam pembangunan

### Success Story

Sampah pada pelaksanaan



Presidensi G20 tidak dibuang ke TPA Suwung Denpasar. Melainkan ke beberapa TPST seperti Kesiman Kertalangu dan TPS-3R lainnya.

### Tindak Lanjut

Peresmian 3 TPST tersebut oleh Menko Marves pada akhir bulan Januari 2023





## f) Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional

### Progres Capaian

Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi ekosistem *mangrove* telah terlaksana dengan baik lintas kementerian dan lembaga, serta mencapai rehabilitasi *mangrove* melebihi target RPJMN

### Capaian : 100%

Tercapainya rehabilitasi *mangrove* seluas 5565 ha untuk tahun 2022

### Faktor Pendukung

Partisipasi aktif para K/L terkait, dukungan dari organisasi non-pemerintah dan masyarakat, serta dukungan sektor swasta/BUMN melalui program CSR/TJSL

### Faktor Penghambat

- Anggaran APBN tidak mencukupi/ tidak ada alokasi khusus untuk program rehabilitasi *mangrove*
- Belum aktifnya sumber pendanaan dari mitra strategis
- Belum maksimalnya sumber pendanaan lainnya: DBH-DR, IPPKH, serta CSR Perusahaan lainnya



### Success Story

- Percepatan efektifnya pendanaan mitra strategis luar negeri (*World Bank* dan *UAE*) dalam program pengelolaan ekosistem *mangrove*, serta pengembangan blue carbon
- Indonesia berhasil membuat ekosistem *mangrove* khususnya tahura *mangrove* Bali sebagai showcase *mangrove* pada event Presidensi G20 Tahun 2022





#### 4. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Koordinasi peningkatan nilai belanja produk dalam negeri dari Pemerintah (K/L dan Pemda) dan BUMN

##### Progres Capaian

Per 2 Januari 2023, belanja K/L dan Pemda sudah mencapai Rp 431,38 triliun

**Capaian : 108,09%**

K/L dan Pemda telah merealisasikan belanja produk dalam negeri sesuai arahan Presiden pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022

##### Faktor Pendukung

- Arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
- Kerja sama yang baik antar K/L dan pemda

##### Faktor Penghambat

- K/L masih belum meng-update data realisasi sesuai waktu yang ditentukan
- Masih terdapat perbedaan data antara data K/L, Pemda dengan data di LKPP

##### Success Story

Selama 2022, telah dilaksanakan Temu Bisnis tahap 1 – 4 yang



dilakukan oleh berbagai K/L terkait. Temu bisnis bertujuan untuk menjembatani K/L, pemda dengan industri dalam negeri, sehingga dapat mempercepat capaian target senilai Rp 400 Triliun

##### Tindak Lanjut

Akan dilakukan temu bisnis tahap ke 5 dan 6 pada 2023



## 5. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

### a) PDB Kemaritiman

#### Progres Capaian

- Penyusunan Standar Data Statistik dan Metadata Statistik
- Pembuatan *Dashboard* Satu Data Statistik Kemaritiman
- Penyusunan PDB Kemaritiman Tahun 2022

#### Capaian: 90%

1. Nilai tambah ekonomi kemaritiman pada 2021 mencapai Rp1290.2 triliun.
2. Kontribusi PDB Kemaritiman 2017-2021 terhadap PDB Nasional berada di kisaran 7,4%-7,94%. Dengan puncak pada 2018.

#### Faktor Pendukung

Kontribusi 13 Kementerian dan 10 Instansi/Lembaga dalam Penyusunan PDB Kemaritiman Indonesia

#### Faktor Penghambat

- Series data yang dibutuhkan cukup panjang
- Data yang diperlukan tersebar di berbagai direktorat (tidak di Pusat Data dan Informasi K/L).



- Data tidak tersedia.
- (Perlu dukungan dari K/L untuk bantuan survei / *indepth study* kepada perusahaan binaan)
- Waktu penyusunan kurang dari 6 bulan

#### Success Story

- Nilai tambah ekonomi kemaritiman pada 2021 mencapai Rp1290.2 triliun.
- Kontribusi PDB Kemaritiman 2017-2021 terhadap PDB Nasional berada di kisaran 7,4% - 7,94%. Dengan puncak pada 2018.



- Tiga besar kluster penyumbang PDB Kemaritiman Tahun 2021, yaitu Perikanan dan Budidaya Maritim (29.11%), Sumber Daya Energi Maritim (24.98%), dan Transportasi & Aktivitas Penunjang Maritim (9.78%).

### Tindak Lanjut

- Penyusunan Standar Data & Meta Data PDB Kemaritiman
- Tata kelola *dashboard* (akses) Penyempurnaan Data & Metodologi PDB Kemaritiman (inc. survei lapangan)

## b) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan OSS

### Progres Capaian

- Terintegrasi Sistem GISTARU dengan OSS
- Terintegrasi Sistem SIMBG dengan OSS
- Terintegrasi Sistem AmdalNet dengan OSS

### Capaian : 90%

- Percepatan proses perizinan dasar KKPR
- Percepatan proses perizinan PGB
- Percepatan proses perizinan lingkungan

### Faktor Pendukung

- Kontribusi 7 Kementerian dan Lembaga
- Ketersediaan Dana K/L Teknis
- Ketersediaan SDM K/L Teknis

### Faktor Penghambat

- Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan baik dipusat maupun daerah yang tidak sinkron





- Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan integrasi system
- Perlu dukungan dari KL untuk melakukan sosialisasi kebijakan *integrasis system OSS ke Daerah*
- Infrastruktur jaringan data belum optimal

### Success Story

- Hingga 26 Des 2022 telah terbit KKPR sebanyak 49.076 proyek. 92% berlokasi di 5 kota besar seperti DKI Jakarta, Bali, Jatim, Jabar dan Sumut.
- Penerbitan PKKPR otomatis hingga 26 Des 2022 telah terbit sebanyak 383.635 Proyek.
- Terhadap PKKPR Penilaian hingga 26 Des 2022 telah terbut 2.174 proyek di 261 kabupaten/kota 31 provinsi
- Perbaikan bisnis proses OSS untuk pemeriksaan dokumen otomatis dan terimplementasikannya SLA 5 hari kerja

### Tindak Lanjut

- Perlu dilakukan pengembangan sistem antara OSS dengan sistem perizinan terkait agar dapat terhubung dengan optimal.
- Koordinasi dengan K/L terkait termasuk dengan Daerah untuk melakukan sosialisasi perubahan sistem sehingga dapat optimal digunakan oleh pemangku perizinan.
- Penyempurnaan bisnis proses sistem oss dengan sistem perizinan terkait pada masing-masing KL pengampu.
- Penyempurnaan integrasi Sistem AmdalNet dengan Sistem OSS khususnya terkait perizinan lingkungan tingkat risiko Menengah Tinggi dan Tinggi.







## c) Rekomendasi Kebijakan Investasi Industri Hijau

### Progres Capaian

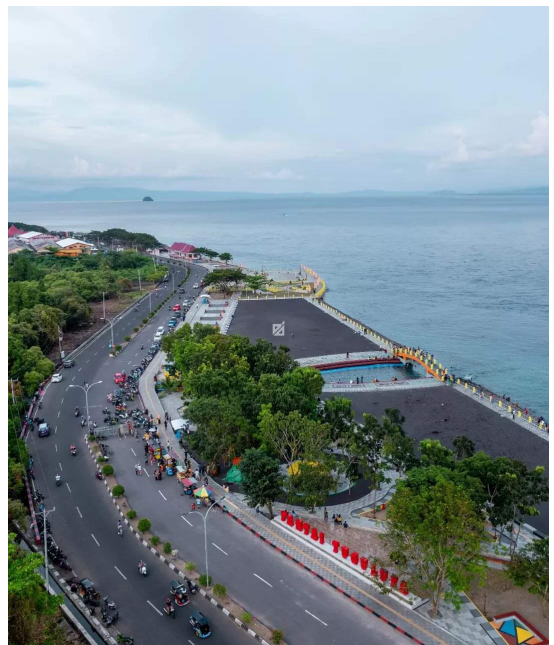
Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Kebijakan Investasi Industri Hijau

### Capaian : 100%

1. *Policy Brief* Rekomendasi Kebijakan Investasi Industri Hijau
2. Tersusunnya dokumen laporan berjudul "Mengawal Investasi Hijau"
3. Nilai *Capital Expenditure* investasi keseluruhan tenant di Kawasan Industri Hijau Tanah Kuning, Kalimantan Utara diproyeksikan mencapai USD132 Miliar

### Faktor Pendukung

- Kepmenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan Pendukung Pembangunan dan Infrastruktur PSN KI Hijau Tanah Kuning, Kalimantan Utara



- Kepmenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 121/DVI Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Kepmenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 68/DVI Tahun 2022 tentang Tim Teknis Percepatan Kebijakan Pendukung Pembangunan dan Infrastruktur PSN KI Tanah Kuning, Kalimantan Utara

### Faktor Penghambat

- Data yang diperlukan tersebar di berbagai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Banyaknya Regulasi yang perlu disinkronkan untuk pengambilan keputusan

### Success Story

- Nilai *Capital Expenditure* investasi tenant Petrokimia mencapai USD56 Miliar

- Nilai *Capital Expenditure* investasi tenant Electronic Alumina mencapai USD8 Miliar

### Tindak Lanjut

- Percepatan proses Tukar Menukar Aset antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Kawasan Industri
- Penyempurnaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) sebagai salah satu enabler investasi hijau









### 3. QUICK WINS

Berdasarkan hasil seleksi dan penilaian *Quick Wins* Tahun 2022 telah ditetapkan 3 (tiga) kegiatan sebagai *Quick Wins* Tahun 2022 dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 159/S Tahun 2022 tentang Penetapan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022. Adapun *Quick Wins* tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berasal dari Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022 dan *Quick Wins Mandatory* sesuai ketentuan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
2. Merupakan urusan utama (*core business*) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan internal dan eksternal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
5. Dilaksanakan untuk diselesaikan di tahun 2022.



## A

MATRIKS *QUICK WINS* TAHUN 2022

NO	UNIT KERJA	PROGRAM PRIORITAS	USULAN <i>QUICK WINS</i>
1	<b>Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	Koordinasi Peningkatan nilai belanja produk dalam negeri dari Pemerintah (K/L-Pemda) dan BUMN.	Koordinasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia
2	<b>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan</b>	Koordinasi Penyusunan RPP Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Koordinasi Penyusunan RPP tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
3	<b>Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi</b>	Koordinasi Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut untuk Segmen Selatan Jawa – Nusa Tenggara	Koordinasi Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk segmen selatan Jawa - Nusa Tenggara



	<b>OUTPUT</b>	<b>WAKTU PENCAPAIAN OUTPUT</b>	<b>MITRA YANG TERLIBAT</b>
	Jumlah belanja barang dan jasa produk dalam negeri sebesar Rp 400 triliun	Desember 2022	29 K/L. LKPP, Bank Indonesia, OJK, BRIN, Pemda, BUMN, Himbara, Penyedia, UMKM, Top Brand, Platform Marketplace, Masyarakat, Campaign Manager
	RPP Pengelolaan Sumber Daya Air	Desember 2022	Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kemenkum dan HAM, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Dokumen Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut untuk Segmen Selatan Jawa - Nusa Tenggara;</li> <li>2. Tersampainya Dokumen Submisi kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB.</li> </ol>	September 2022	Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS), Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut, Tim Pakar (Akademisi)

## 1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Koordinasi Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk segmen selatan Jawa-Nusa Tenggara

**Capaian: 100%**

1. Tersusunnya Dokumen Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut untuk Segmen Selatan Jawa – Nusa Tenggara
2. Tersampainya Dokumen Submisi kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB

### Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari segi hukum maupun ilmiah (geomorfologi, geodesi, dsb.) Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan hak untuk wilayah dasar laut (landas kontinen) di selatan Jawa-selatan Nusa Tenggara seluas 245.711 km<sup>2</sup>, submisi segmen selatan Jawa – selatan Nusa Tenggara ini menjadi klaim terluas yang pernah diajukan oleh Indonesia kepada UN-CLCS. Hasil tersebut diraih dari kerja keras bersama lintas K/L yang didukung para pakar dan akademisi anak bangsa mulai tahun 2008 yang kemudian diaktifkan dan diakselerasi kembali semenjak 2018 oleh Kemenko Marves tanpa bantuan tenaga asing

### Success Story

Diterimanya dokumen dimaksud menggenapkan total luas submisi perluasan landas kontinen Indonesia



menjadi 653.677 km<sup>2</sup> atau sepertiga dari luas daratan Indonesia

### Tindak Lanjut

Di kesempatan yang sama, Delegasi Pemri yang terdiri dari perwakilan Kemenko Marves, Kementerian Luar Negeri, Badan Informasi Geospasial, dan Pusat *Hidro-Oseanografi* juga memenuhi undangan dari UN-CLCS untuk mempresentasikan submisi parsial ketiga perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut Indonesia, yakni untuk segmen barat daya Sumatra, pada pertemuan ke-55 *UN Commission on the Limits of the Continental Shelf (UN-CLCS)*. Presentasi dilakukan secara tertutup pada tanggal 11 Agustus 2022 dimulai pukul 10.00 bertempat di Markas Besar PBB, New York, dan dihadiri oleh 20 orang anggota UN-CLCS



## 2. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Koordinasi Penyusunan RPP Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

### Progres Capaian

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air telah selesai disusun dan saat ini sedang dalam tahap harmonisasi

### Capaian: 100%

Dokumen Rancangan PP tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

### Faktor Pendukung

- Setkab dan K/L terkait terlibat secara aktif dan intens dalam pelaksanaan harmonisasi
- Surat Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan kepada Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham perihal permohonan percepatan proses harmonisasi



### Faktor Penghambat

- Beberapa peraturan antar K/L yang belum sinkron dan memerlukan pendalaman lebih lanjut
- Peserta harmonisasi yang sering berganti dan konssten dalam mengikuti proses harmonisasi

### Tindak Lanjut

Pengawasan proses harmonisasi dan mendorong Kemenkumham untuk menambah intensitas pembahasan RPP Pengelolaan SDA





### 3. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Koordinasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia

#### Progres Capaian

Per 2 Januari 2023, belanja K/L dan Pemda sudah mencapai Rp 431,38 triliun

**Capaian : 108,09%**

K/L dan Pemda telah merealisasikan belanja produk dalam negeri sesuai arahan Presiden pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022

#### Faktor Pendukung

- Arahan presiden pamelalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
- Kerja sama yang baik antar K/L dan pemda

#### Faktor Penghambat

- K/L masih belum meng-update data realisasi sesuai waktu yang ditentukan
- Masih terdapat perbedaan data antara data K/L, Pemda dengan data di LKPP



#### Success Story

Selama 2022, telah dilaksanakan Temu Bisnis tahap 1–4 yang dilakukan oleh berbagai K/L terkait. Temu bisnis bertujuan untuk menjembatani K/L, pemda dengan industri dalam negeri, sehingga dapat mempercepat capaian target senilai Rp 400 Triliun

#### Tindak Lanjut

Akan dilakukan temu bisnis tahap ke 5 dan 6 pada 2023



## 4. PENUTUP

**P**elaksanaan Program Prioritas dan *Quick Wins* pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan suatu upaya dalam mendukung percepatan kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk dapat segera menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara nasional maupun global.

Penyelenggaraan *Quick Wins* juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan *Quick Wins* adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sesuai dengan peran, tupoksi, dan karakteristiknya

Dalam pelaksanaannya, baik Program Prioritas maupun *Quick Wins* perlu diimbangi dengan upaya pemantauan serta evaluasi secara berkala untuk memastikan target dari masing-masing program tercapai (baik dari segi waktu maupun *ouput* yang dihasilkan).







**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

---

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 158/S TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi yang signifikan dan strategis bagi pencapaian Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 maupun pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tahun 2020-2024, perlu menetapkan Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tentang Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
  8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 92/S Tahun 2022 tentang Tim Penilai Program Prioritas dan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2022.

KESATU : Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022 merupakan program yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat isu, lintas urusan/sector, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.
2. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan sasaran nasional dalam RKP 2022.
3. Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan berdasarkan arahan dan/atau instruksi Presiden.
4. Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat.



5. Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan.
6. Memerlukan tindak lanjut berupa kebijakan publik yang dikeluarkan dan dikoordinasikan lintas sektoral.
7. Suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
8. Dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- KEDUA : Program Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022 dilaporkan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Desember 2022

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 158/S TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2022

**MATRIKS PROGRAM PRIORITAS  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
TAHUN 2022**

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan (PPAKP).	1. Permohonan izin Prakarsa RAN PPAKP; 2. Penyelesaian pengaduan pelaut dan ABK pada website resmi Kemenko Marves; 3. Penyelenggara an <i>Annual Southeast Asia Forum on</i>	1. Tersusunnya rekomendasi kebijakan hasil harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan di sektor perikanan khususnya yang terkait perlindungan	Memberikan arahan strategis bagi K/L dan acuan bagi pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelaut dan awak kapal perikanan.	1. Kementerian/ Lembaga terkait yang melaksanakan operasi dan pengawasan pelaut dan awak kapal perikanan; 2. Pemerintah Provinsi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;	Deputi Bidang Koordinasi Keadaulatan Maritim dan Energi.	Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekonomian nasional.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan.



NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p><i>Sustainable Capture Fisheries (ASEAF-SCF): Leveraging Southeast Asia Business Competitiveness through Combating IUU Fishing and Protecting Human Rights in Fisheries;</i></p> <p>4. Pembentukan Tim Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pelindungan Pekerja Sektor Perikanan khususnya yang Bekerja di atas Kapal Penangkapan Ikan Penyelenggara an <i>Southeast</i></p>	<p>pekerjaan sektor perikanan, khususnya yang bekerja di atas kapal penangkap ikan agar peraturan perundang-undangan Indonesia dapat selaras dengan standar di Konvensi ILO 188 pada bulan Maret sampai September 2022;</p> <p>2. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan terkait inspeksi Bersama Kementerian / Lembaga terkait di atas kapal penangkap ikan pada bulan Maret</p>		<p>3. Pemerintah Kabupaten/ Kota yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>4. Sektor Ketenagakerjaan Indonesia;</p> <p>5. Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>6. Masyarakat yang berprofesi sebagai awak kapal perikanan.</p>					

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Koordinasi Penyelenggaraan <i>Archipelagic and Island States Forum</i> (AIS Forum) Tahun 2022.	<p><i>Asia Forum on Fisheries</i>; 5. Penyelenggaraan <i>Asia Forum on Fisheries</i>.</p> <p>Penyelenggaraan <i>Archipelagic and Island States Forum</i> dengan Pertemuan Tingkat Menteri (<i>Ministerial Meeting</i>) AIS Forum dan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (<i>Senior Official Meeting</i>) AIS Forum.</p>	<p>Terselenggaranya <i>Archipelagic and Island States Forum</i> (AIS Forum) tingkat SOM dan MM) pada Bulan November Tahun 2022.</p>	<p>Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seiring dengan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, telah menginisiasi pembentukan Forum Negara Pulau dan Kepulauan (<i>Archipelagic and Island States Forum</i> / AIS Forum) semenjak tahun 2017. Pembentukan forum ini didasari kesamaan kondisi dan</p>	<p>1. Pemerintah Indonesia; Negara-negara peserta AIS Forum; 3. Kementerian/Lembaga pelaksana diplomasi maritim; 4. Pemangku kepentingan terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Sekretaris AIS); 5. Masyarakat Pesisir, Kemaritiman, dan Kelautan Nasional; 6. Pimpinan sebagai bahan rekomendasi kebijakan.</p>	<p>Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.</p>	<p>Teguhnya jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat.</p>	<p>Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik.</p>	<p>Optimalnya Kebijakan Luar Negeri.</p>	<p>1. Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional; 2. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global.</p>

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022			
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				tantangan yang dihadapi oleh negara-negara pulau kepulauan di seluruh dunia. Rencana Penyelenggaraan AIS Forum Tahun 2022 akan menjadi dasar bagi komitmen besar bersama akan kerja sama nyata antara negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia pada empat area utama (implementasi ekonomi biru, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanggulangan polusi laut terutama sampah plastik di laut), serta tata kelautan							



NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Koordinasi Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut untuk Segmen Selatan Jawa - Nusa Tenggara.	1. Penyusunan Dokumen Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut untuk Segmen Selatan Jawa - Nusa Tenggara; 2. Penyampaian Dokumen Submisi kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB pada Bulan September 2022.	Tersampaikankannya Dokumen Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut untuk Segmen Selatan Jawa - Nusa Tenggara kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perluasan hak berdaulat ini penting bagi Indonesia agar Indonesia bisa mengatur, menjaga, dan memanfaatkan secara berkelanjutan potensi (migas, mineral, dan sumber daya hayati) di area tersebut demi	1. Kementerian dan Lembaga pelaksana urusan Kementerian, terkait pengelolaan batas laut dan pengembangan kawasan perbatasan; 2. Pelaksanaan diplomasi maritim terkait batas terluar zona maritim Indonesia; 3. Kementerian teknis dan Lembaga riset dan pengkajian; 4. Pemangku kepentingan terkait (pihak swasta dan pemerintah pusat dan daerah) Pimpinan sebagai bahan rekomendasi	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.	Teguhnya jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat.	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri.		

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Sinergi Penyelenggaraan Data Batimetri Indonesia.	1. Pembaruan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Nasional Penyelenggara an Data Batimetri Indonesia; 2. Koordinasi Penyelenggara an dan Integrasi Data Batimetri Indonesia ke dalam sistem batimetri nasional.	Data Batimetri seluruh wilayah Indonesia yang terintegrasi melalui sistem batimetri nasional pada Bulan September 2022.	kemakmuran rakyat dan kemajuan negara kedepannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara. Sebagai negara anggota dari UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah perairan yang terdiri atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Di samping itu, kedaulatan Indonesia juga mencakup dasar laut dan seisinya, serta ruang udara di	kebijakan bidang Kedaulatan Maritim dan Energi.	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.	Teguhnya jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat.	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Konsolidasi Demokrasi.	

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				atas dari wilayah perairan tersebut, bahkan sampai seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Data Batimetri (kedalaman laut) merupakan salah satu data dasar di dalam pengelolaan dan pembangunan kemaritiman, seperti pembangunan Kawasan pesisir, penentuan alur laut pelayaran, penetapan rencana tata ruang laut, dan lain sebagainya. Saat ini, data batimetri Indonesia dikumpulkan secara parsial dan tidak terintegrasi oleh pemangku kepentingan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan orologyogi Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI-AL; 2. Penerima Manfaat Lain (Pemda/Instansi/pihak swasta/masyarakat) antara lain : Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pihak Swasta, Masyarakat; 3. Penerima Manfaat Internal Kemerkor Marves antara lain : Unit Kedepujian					



NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Koordinasi Percepatan Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) da-	1. Rapat Sinkronisasi Program Bidang PRZ dengan PRL KKP; 2. Rakor Penyelesaian isu terkait RZWP3K (Prov. Kepri dan/atau Bali); 3. Rakor Percepatan RZWP3K	Output: Dokumen Peraturan Daerah RTRW Hasil Integrasi Daratan dan Laut Provinsi. Target 2022: 6 (enam) RTRW Provinsi Terintegrasi.	terkait, seperti Kementerian/Lembaga/TNI, BUMN, Swasta, dan kalangan akademik. Hal ini perlu dikoordinasikan di tingkat nasional agar seluruh data batimetri yang tersedia akan dapat tersaji dalam satu basis data nasional yang terintegrasi.	K/L, pemerintah daerah, pelaku usaha, nelayan, pembudidaya, masyarakat adat, dan masyarakat pada umumnya.	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam.	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan.	Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut.

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	lam RTRW Provinsi.	lainnya (Pertek MKP, Persub ATR, Evaluasi Kemendagri); 4. Rakor penyelesaian isu terkait integrasi RZ-RTR.		pemanfaatan ruang laut (KKPKL); 3. Meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan.						
6	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Blue Halo.	1. Rapat koordinasi internal pembahasan Blue Halo; 2. Menyusun matriks kriteria WPP NRI, sebagai dasar pemilihan lokasi Pilot Project Blue Halo; 3. Penyiapan rencana dan pelaksanaan soft launching pilot project; 4. Workshop Rencana Aksi Implementasi pilot project Blue Halo;	Output: Dokumen Peraturan Presiden tentang Pendanaan Ekonomi Biru Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Kawasan Konservasi Perairan dan Ekosistem Laut.  Target 2022: Penetapan Dokumen Peraturan Presiden tentang Pendanaan Ekonomi Biru	Peningkatan kontribusi perikanan pembangunan nasional.	Pemda, KKP, PPN/Bappenas, Kemenkeu, PUPR, KemenBUMN, Pelaku usaha perikanan tangkap.	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.	1. Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis; 2. Meningkatkan produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam.	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan.	Peningkatan Pengelolaan Wilayah Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut.

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p>5. Kajian awal spillover dan kelimpahan jenis ikan di lokasi <i>Pilot Project Blue Halo</i> dan kawasan perairan sekitarnya; sekitarannya;</p> <p>6. Menyusun proposal detail dan strategi pembiayaan untuk diusulkan ke <i>Blue Halo Blended Finance</i>;</p> <p>7. Mengawal dan mendorong proses internalisasi program <i>pilot project Blue Halo</i> kedalam skema pembiayaan G20 &amp; SDGS, sebagai inisiatif pembiayaan</p>	<p>Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Kawasan Konservasi Perairan dan Ekosistem Laut.</p>							



NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		implementasi <i>Blue Halo</i> ; 8. Menyusun draf payung hukum operasionalisasi dan pembiayaan <i>pilot project Blue Halo</i> ; 9. <i>Workshop</i> Rencana Aksi Implementasi <i>Blue Halo 2023 – 2025</i> ; 10. <i>Launching Blue Halo Project</i> di Indonesia; 11. <i>Workshop</i> evaluasi <i>pilot project</i> dan persiapan <i>launching Blue Halo Project</i> di Indonesia.								
7	Koordinasi Pengembangan <i>Cluster</i> Perikanan Budidaya Unggulan pada 6 Lokasi.	1. Rapat Penyusunan dan Penetapan Agenda Kebijakan Pengembangan <i>Cluster</i>	Output: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan <i>Cluster</i> Perikanan Budidaya Unggulan.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 8,69 Juta Ton dan <i>cluster</i> komoditas	Pelaku Usaha Budidaya, Pemda, KKP, Kemen PUPR, Kemen Perdagangan, dan Kemen Desa.	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.	Meningkatkan produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam.	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan.	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p>Budidaya Unggulan (Tawar, Payau, Laut);</p> <p>2. Rakor Tindak Lanjut Pengembangan Perikanan <i>Seaweed Estate</i> Terintegrasi Hulu Hilir;</p> <p>3. Rakor Pengembangan Model Korporasi Budidaya pada Klaster Budidaya Unggulan;</p> <p>4. Rakor Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Budidaya;</p> <p>5. Rakor Dukungan Infrastruktur Klaster Budidaya Unggulan;</p> <p>6. Rakor Pengembangan sistem</p>	<p>Target 2022: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Klaster Perikanan Budidaya Unggulan pada TW IV.</p>	<p>unggulan sebesar 30 klaster pada tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN.</p>				<p>dan Berkeadilan.</p>		<p>Kelautan dan Perikanan.</p>

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Distribusi, Hilirisasi, dan Pemasaran Hasil Budidaya; 7. Rakor Pengembangan Model Kerjasama Swasta dan Pembudidaya pada Klaster Budidaya Unggulan; 8. Rakor Pengembangan Akses Permodalan Budidaya; 9. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan (Tawar, dan Payau, dan Laut).								
8	Koordinasi Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk	1. Rapat Koordinasi Penataan dan penerapan regulasi	Output: Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan	Meningkatnya ekspor produk kelautan dan perikanan RI untuk mencapai	Para pelaku usaha perikanan, Asosiasi Perikanan, Pemerintah Daerah, Kementerian	Deputi Bidang Koordinasi Sumber	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah	1. Terwujudnya pemerataan	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuh-	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan.



NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022			
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	
(1)	KP dari Hulu-Hilir yang Terintegrasi.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p>terkait Peningkatan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan pada tingkat pusat dan daerah (di Bandung dan Bali);</p> <p>2. Koordinasi dan movev terkait Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang mutu produk Kelautan dan Perikanan di Tempat Pelelangan/Pe masaran Ikan Higienis serta Pasar Ikan Modern. (Palembang, Bitung, dan Lampung);</p> <p>3. Koordinasi dan Movev terkait Peningkatan</p>	<p>tentang Strategi Peningkatan Daya Saing melalui terciptanya Produk KP yang bermutu, aman dan berdaya saing tinggi serta memenuhi persyaratan mutu internasional.</p> <p>Target 2022: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan tentang Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.</p>	<p>target nilai ekspor produk KP sebesar USD 8,2 M pada 2024.</p>	<p>Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri.</p>	<p>Daya Maritim.</p>	<p>sumber daya alam.</p>	<p>Pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis; dan</p> <p>2. Meningkatkan produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam.</p>	<p>an yang Berkualitas dan Berkeadilan.</p>	<p>(11)</p>	

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p>kompetensi dan jumlah/kapasitas petugas mutu produk Kelautan dan Perikanan (Jakarta dan Surabaya);</p> <p>4. Koordinasi dan Monev terkait Peningkatan kemampuan telusur (<i>traceability</i>) dalam rangkaian proses produksi produk kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir (Yogyakarta);</p> <p>5. Koordinasi dan Monev terkait Peningkatan kompetensi dan jumlah laboratorium uji;pemeriksa</p>								

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p>an mutu produk Kelautan dan Perikanan (Makasar);</p> <p>6. Koordinasi dan Money terkait Peningkatan Pelayanan Sertifikasi Mutu bagi pelaku usaha (nelayan, petambak, <i>supplier</i> ikan, Unit Pengolahan Ikan) (Balik papan) Rapat Koordinasi Regional terkait Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan Perikanan yang Terintegrasi dari Hulu sampai Hilir</p>								



NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Koordinasi Penguatan Hilirisasi Industri KP berupa Kemudahan Berusaha melalui Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri.	(Aceh, Mataram dan Maluku). 1. Rapat internal upaya percepatan pembangunan dan sertifikasi ISO, SNI dan TKDN produk <i>reefer container</i> buatan dalam negeri (di Kantor Negeri Marves); 2. Rapat koordinasi monitoring progres pembangunan dan sertifikasi SNI & TKDN produk <i>reefer container</i> kapasitas 1 dan 5 ton serta kapasitas 20' dan 40' dan rencana pemanfaatan oleh PT PELNI (Persero);	Output: Rancangan Rekomendasi Kebijakan tentang Penggunaan <i>Reefer Container</i> Produksi Dalam Negeri untuk Kepentingan Nasional RI.  Target 2022: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan tentang Penggunaan <i>Reefer Container</i> Produksi Dalam Negeri untuk Kepentingan Nasional RI.	Mendukung penguatan hilirisasi industri kelaualan dan perikanan melalui dukungan terhadap logistik dan rantai pasok dingin sektor produk KP, salah satunya dengan pelaksanaan inovasi untuk produksi <i>reefer container</i> dalam negeri.	Para pelaku usaha perikanan, Pemerintah Daerah, KKP, Kemendag, dan Kemenperin.	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam.	1. Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis; dan 2. Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam.	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan.

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p>3. Rapat koordinasi persiapan rencana uji coba pemasangan mini <i>plan reefer container</i> PT INKA kapasitas 1 ton pada kapal PT PELNI (Persero);</p> <p>4. Rapat koordinasi tindak lanjut rencana uji coba pemasangan mini <i>plan reefer container</i> PT INKA kapasitas 1 ton pada kapal PT PELNI (Persero);</p> <p>5. Kunjungan lapangan dan koordinasi</p>								

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p>terkait uji coba pemasangan <i>mini plan reefer container</i> PT INKA kapasitas 1 ton pada kapal PT PELNI (Persero) di Indonesia Timur (Saumlaki);</p> <p>6. Koordinasi dukungan LKPP terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk <i>reefer container</i> buatan dalam negeri;</p> <p>7. Monitoring progres penyelesaian pengurusan sertifikasi ISO, SNI dan</p>								

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		TKDN produk <i>reefer container</i> buatan dalam negeri; 8. Evaluasi kebijakan pemanfaatan <i>reefer container</i> kapasitas kecil untuk mendukung <i>pilot project</i> PT PELNI (Persero) yakni pengadaan <i>reefer container</i> kapasitas kecil untuk angkutan beku di Wilayah Indonesia Timur; 9. Evaluasi kebijakan pemanfaatan <i>reefer container</i> kapasitas 20' dan 40' ton								



NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Implementasi Perpres No 87 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.	<p>untuk kebutuhan ekspor serta pemanfaatan <i>reefer container</i> kapasitas 1 dan 5 ton untuk kapal nelayan dan angkutan distribusi.</p> <p>1. Kebijakan Infrastruktur dan Penataan Ruang; 2. Kebijakan Infrastruktur Perekonomian</p>	Selesainya program/proyek prioritas 1 (P1) pada tahap konstruksi yang telah memenuhi <i>Readiness Criteria</i> .	Termanfaatkannya secara optimal potensi daerah/nasional baik sarana maupun prasarana infrastruktur serta sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional.	Pemerintah, Pelaku Usaha, K/L, masyarakat.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.	Terwujudnya Pemerintahan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kearifan dan Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Pengembangan Wilayah Jawa Bali.	Pengembangan Kawasan Strategis. Pengembangan Sektor Unggulan. Pengembangan Kawasan perkotaan. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Transmigrasi.
								Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan-	Infrastruktur Pelayanan Dasar.	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi layak dan aman

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Pengendalian Kebijakan Konsolidasi Muatan Balik Program Tol Laut.	Kebijakan Sistem Logistik Nasional.	Konsolidasi Muatan Balik dengan <i>Stakeholder</i> .	Meningkatnya muatan balik, turunnya Biaya Logistik terhadap PDB, meningkatnya daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat.	Pemerintah, Pelaku Usaha, K/L, masyarakat.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.	Terwujudnya Pemerintahan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga.
12	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden	1. Pembahasan penetapan Tim Panitia Antar-K/L	Output: Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu	Mengimplementasikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan	1. KLHK; 2. Kemenkeu; 3. KKP; 4. Kemendikbudristek;	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan	Menciptakan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dengan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Infrastruktur Ekonomi.	Konektivitas Laut.

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	tentang Perencanaan Terpadu Perhutanan Sosial.	2. Pembahasan penetapan Izin Prakarsa; 3. Rakormis Penyelesaian Batang Tubuh RPerpres tentang Perencanaan Terpadu Perhutanan Sosial; 4. Rakormis Penyelesaian Matriks Renaksi RPerpres tentang Perencanaan Terpadu Perhutanan Sosial; 5. Penanda-tanganan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu	Perhutanan Sosial.  Target 2022: TW IV 2022.	memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui perhutanan sosial dan kemitraan konservasi.	5. Kementerian KUMHAM; 6. Kemendes-PDPT; 7. Kemenkop UKM; 8. Kementan; 9. Kementerian Parekras; 10. Kemendagri; 11. KemenPPN/Bappenas; 12. Kemensetneg; 13. KemenPUPR; 14. Kemensos; 15. Kantor Staf Presiden; 16. Setkab; 17. Pemerintah Daerah; 18. Akademisi/Ahli; 19. Masyarakat; 20. Pelaku Usaha.	dan Kehutanan.	mempertahankan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang.	dan Berdaya Saing.		

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Koordinasi Penyusunan Dokumen Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu Hilir.	Perhutanan Sosial. 1. Pembentukan Pokja penyusun Dokumen Strategi Nasional; 2. Pembahasan draf dokumen Stranas; 3. Penetapan Payung Hukum Stranas; 4. Pembahasan lanjutan draf Stranas; 5. Pembahasan payung hukum dokumen Stranas; 6. FGD draf Stranas; 7. Pemanjapan dokumen final Stranas; 8. Peluncuran dokumen Stranas.	Output : Tersedianya 1 (satu) Dokumen Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu Hilir.  Target : Tersusunnya Dokumen Strategi Nasional Pengembangan Bambu Hulu Hilir.	Dokumen yang akan menjadi pedoman untuk pengembangan pemanfaatan bambu mulai dari sektor hulu sampai dengan pengelolaan disektor hilir.	Masyarakat K/L Teknis Terkait.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.	Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia.	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.	Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan.



NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
14	Koordinasi <i>Pilot Project</i> Kemitraan Pengusahaan Biomassa ( <i>woodchip</i> dan <i>wood pellet</i> ) dengan batubara untuk mendukung program <i>cofiring</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengayaan Data;</li> <li>2. Penyusunan Pokja;</li> <li>3. Penyusunan Renaksi;</li> <li>4. Penyusunan konsep business model B2B, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama;</li> <li>5. Peluncuran <i>Pilot Project</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Pokja;</li> <li>2. Renaksi.</li> </ol>	Model kerja sama perusahaan kehutanan dan Pertambangan dengan pemanfaatan skema multusaha kehutanan dan pemanfaatan lahan reklamasi pada kawasan hutan dan area pemanfaatan lain yang dapat diduplikasi pada daerah-daerah lain.	Masyarakat K/L teknis Pemerintah Daerah.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.	(8) Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia.	(9) Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	(10) Peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.	(11)
15	Koordinasi Penyusunan RPP Tengah Pengelolaan Sumber Daya Air.	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.	RPP Pengelolaan Sumber Daya Air.	Percepatan penyelesaian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air agar dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan secara berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemen PUPR;</li> <li>2. Kemenag;</li> <li>3. Kemendagri;</li> <li>4. Kemen LHK;</li> <li>5. Kemen ATR/BPN;</li> <li>6. Beppenas;</li> <li>7. Kemenkeu;</li> <li>8. Kementerian ESDM;</li> <li>9. Kemendag</li> <li>10. Kemminves/BKPM;</li> </ol>	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dan membangun lingkungan hidup, meningkatkan		

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Koordinasi Percepatan Penanganan Sampah di Kota Denpasar.	Penanganan sampah melalui pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah.	Output Terlaksananya pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah di 3 (tiga) lokasi di Kota Denpasar.	Optimalisasi Penanganan Sampah di Hilir, dan menigitasi volume sampah yang diangkut ke TPA.	1. Pemerintah Daerah Kota Denpasar; 2. Pemerintah Provinsi Bali; 3. KLHK; 4. Kemendagri; 5. Kemen PPN; 6. Kemen PPN; 7. <i>Offtaker</i> .	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.	Meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia.	Membangun lingkungan hidup Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Penanggulan an pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
17	Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.	1. Koordinasi program pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis mangrove seluas 12.500 Ha berdasarakan RPJMN 2020-2024 dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2022;	1. Pencapaian target luasan rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat tahun 2022 dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024;	Pemerintah memiliki target untuk merehabilitasi lahan kritis mangrove seluas 600.000 ha sampai dengan tahun 2024. Pokja Mangrove Nasional dan <i>Roadmap</i> Rehabilitasi akan menjadi acuan/pedoman dalam menjalankan	1. Kementerian ESDM; 2. Kemen PUPR; 3. Kemenhub; 4. KLHK; 5. KKP; 6. Kemendagri; 7. Kemenlu; 8. PPN/ Bappenas; 9. BRIN.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Koordinasi Peningkatan nilai belanja produk dalam negeri dari Pemerintah (K/L-Pemda) dan BUMIN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kelompok Kerja Mangrove Nasional 2022;</li> <li>Koordinasi Penyusunan <i>Roadmap</i> Rehabilitasi Mangrove Nasional dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepmenko Pokja Mangrove Nasional;</li> <li>Dokumen <i>Roadmap</i> Rehabilitasi Mangrove.</li> </ol>	<p>program nasional tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan belanja pemerintah melalui produk dalam negeri minimal 400T;</li> <li>Mengurangi produk impor dalam belanja pemerintah;</li> <li>Mendukung penguatan <i>supply</i> dari industri dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Usaha Mikro Kecil;</li> <li>Koperasi;</li> <li>Negara;</li> <li>Masyarakat.</li> </ol>	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif yang berdaya saing.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Peningkatan ekspor bernilai tambah dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).	Peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri.

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p>2. Mengurangi pembelian produk impor pada pengadaan barang/jasa pemerintah;</p> <p>3. K/L dan Pemdayang mengusulkan impor harus membuat kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor s.d 5% pada tahun 2023;</p> <p>4. Mengembangkan <i>government marketplace</i> yang mudah diakses untuk mempertemukan suplai produk dalam negeri dengan permintaan dari K/L dan Pemda.</p>		<p>UMKM dalam meningkatkan kapasitas &amp; pengembangan industri baru;</p> <p>4. Menciptakan permintaan bagi industri &amp; UMKM yang menghasilkan produk dalam negeri.</p>						



NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	19	Rekomendasi Kebijakan PDB Kemaritiman.	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1. Penyusunan Standar Data Statistik dan Metadata Statistik; 2. Pembuatan <i>Dashboard</i> Satu Data Statistik Kemaritiman; 3. Penyusunan PDB Kemaritiman Tahun 2022.	Dokumen Strategis PDB Kemaritiman 2010 – 2021.	1. Pengambilan keputusan yang informatif serta perumusan kebijakan yang tepat dalam mengembangkan bidang kemaritiman di Indonesia; 2. Terwujudnya satu data statistik kemaritiman.	1. Pemerintah Republik Indonesia; 2. Kementerian PPN/ BAPPENAS; 3. Badan Pusat Statistik.	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan an.	Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekonomian nasional.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan .	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor RiiL, dan Industrialisasi.	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir.
	20	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan <i>One Single Submission</i> (OSS).	Rekomendasi Kebijakan OSS-RBA dengan GISTARU dan Amdal.	Banyaknya proses perizinan dinilai cukup menyita banyak waktu, disamping itu terdapat juga beragam jenis perizinan yang dikeluarkan oleh masing-masing K/L dan Pemda. Untuk itu setiap proses dan jenis perizinan	Pemerintah Daerah, BKPM, Kemko Perekonomian KLHK, PUPR, Badan Usaha.	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan an.	Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor RiiL, dan Industrialisasi.	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan.

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Rekomendasi Kebijakan Investasi Industri Hijau.	<p>Integrasi OSS-RBA dengan SIMBG;</p> <p>4. Rakor Implementasi Sistem OSS-RBA dengan Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian LHK.</p>	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Perizinan Investasi Kawasan Industri Hijau.	<p>1. Peningkatan Realisasi Investasi Indonesia;</p> <p>2. Terwujudnya industri yang mendukung ketahanan energi dalam perubahan iklim;</p> <p>3. Kontribusi bagi pembangunan dan berkelanjutan yang berbasis energi hijau;</p>	<p>1. Kementerian Investasi/BKPM;</p> <p>2. Kementerian Perindustrian;</p> <p>3. Kementerian ESDM;</p> <p>4. Kemenaker;</p> <p>5. Kemenhub;</p> <p>6. Kementerian PUPR;</p> <p>7. Kemen ATR/BPN;</p> <p>8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;</p> <p>9. Pemerintah Kabupaten Bulungan.</p>	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.	Menguatnya jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Rili, dan Industrialisasi.	Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa.

NO	NAMA PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KERJA TAHUN 2022	OUTPUT & TARGET TAHUN 2022	URAIAN MANFAAT	PENERIMA MANFAAT	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG (dalam Renstra 2020-2024)	DUKUNGAN TERHADAP RKP 2022		
								PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				4. Pemerataan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di luar Jawa; 5. Peningkatan Industri yang berteknologi tinggi.						

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Indi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

AYODHIA G. L. KALAKE



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA

---

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 159/S TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN *QUICK WINS*  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi yang signifikan dan strategis bagi pencapaian Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tahun 2020-2024, perlu menetapkan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tentang *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Tahun 2022;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
  8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
  9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 92/S Tahun 2022 tentang Tim Penilai Program Prioritas dan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PENETAPAN *QUICK WINS* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2022.

KESATU : *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022 merupakan program yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Berasal dari Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022.
2. Merupakan urusan utama (*core business*) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan internal dan eksternal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
5. Dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- KEDUA : *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022 dilaporkan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Desember 2022

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Dudi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 159/S TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
*QUICK WINS* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN TAHUN 2022

**MATRIKS *QUICK WINS***  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**  
**TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b><i>QUICK WIN</i></b>	<b>OUTPUT</b>	<b>WAKTU PENCAPAIAN OUTPUT</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>MITRA YANG TERLIBAT (K/L TEKNIS)</b>
1.	Koordinasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan dalam Rangka Bangsa Buatan Indonesia.	Jumlah belanja barang dan jasa produk dalam negeri sebesar Rp 400 T.	Desember 2022.	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	29 K/L. LKPP, Bank Indonesia, OJK, BRIN, Pemda, BUMN, Himbara, Penyedia, UMKM, <i>Top Brand, Platform Marketplace</i> , Masyarakat, <i>Campaign Manager</i> .
2.	Koordinasi Penyusunan RPP tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.	RPP Pengelolaan Sumber Daya Air.	Desember 2022.	Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan.	Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian



	3. Koordinasi Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk segmen selatan Jawa - Nusa Tenggara.	1. Tersusunnya Dokumen Submisi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen selatan Jawa Nusa Tenggara. 2. Tersampainya Dokumen Submisi kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB.	September 2022.	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.	Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kemenkum dan HAM, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
					Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS), Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut, Tim Pakar (Akademisi)

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN  
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
pala Biro Hukum,



Edi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002







Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340  
 INDONESIA  
 Telp : +62 21 23951100  
 email : [kemenkomaritim@maritim.go.id](mailto:kemenkomaritim@maritim.go.id)  
[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
 KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

@Kemenko Kemaritiman Dan Investasi

@kemenkomarves

@Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

@kemenkomarves

